

No. 131 November - Desember 2016

BaKTI**News**

www.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

**KISAH KALABIA
DI RAJA AMPAT**

**WARNA WARNI
PERTUKARAN
PENGETAHUAN
DI GREEN PROSPERITY
KNOWLEDGE FAIR**

**MEMANGKAS
GALAU
NELAYAN JEROWARU**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771979 777057



BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.bakti.or.id

Editor **M. YUSRAN LAITUPA**
VIKTORIA NGANTUNG
SYAIFULLAH

Suara Forum KTI **ZUSANNA GOSAL**
ITA MASITA IBNU

Events at BaKTI **SHERLY HEUMASSE**

Website **ADITYA RAKHMAT**

Smart Practices
& Info Book **SUMARNI ARIANTO**

Database & Sirkulasi **A. RINI INDAYANI**

Design & Layout
Editor Foto **ICHSAN DJUNAEED**

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS BaKTINews** 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201**

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News**

Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.*

MENJADI PELANGGAN BaKTI**News**

Subscribing to BaKTI**News**

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

*To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id.*

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

Daftar Isi

BaKTI**News**

November - Desember 2016

No. **131**

- 1** Warna Warni Pertukaran Pengetahuan di Green Prosperity Knowledge Fair
Oleh **Afdhaliyana Ma'rifah & Syaifullah**
- 8** Praktik Cerdas
Skol Amnasit Membimbing Orang Tua dalam Mengasuh Anak
- 9** Praktik Cerdas
Pusat Belajar Kakao Jembatan Kesejahteraan Petani
- 11** Inovasi Transportasi Publik Yang Dicintai Warga Kota Makassar
Oleh **Abd. Rahman Ramlan**
- 15** Kisah Kalabia di Raja Ampat
- 21** BaKTI - MAMPU
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Program MAMPU
Oleh **M. Ghufan H. Kordi K.**
- 27** MCA-Indonesia
Memangkas Galau Nelayan Jerowaru
Oleh **Syaifullah**
- 31** Restorasi dan Reintegrasi Berbasis Masyarakat Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Oleh **Arafah**
- 34** Perubahan Besar dari Upaya yang Sederhana
Oleh **Irawan Dermayasamin Ibrahim**
- 35** MCA-Indonesia
Pekerjaan Rumah dari Diskusi dan Pemutaran Film Dokumenter
Oleh **Syaifullah**
- 39** Update BatukarInfo
- 40** Kegiatan BaKTI
- 41** Info Buku
- Foto Cover : **Yusuf Ahmad**





GREEN PROSPERITY KNOWLEDGE FAIR 2016

WARNA WARNI PERTUKARAN PENGETAHUAN DI GREEN PROSPERITY KNOWLEDGE FAIR

Oleh **Afdhaliyana Ma'rifah & Syaifullah**



Jarum jam telah lewat beberapa menit dari pukul 16:40 WIB. Bagian depan beberapa ruang rapat lantai dua Hotel Le Meridien Jakarta sudah ramai oleh para peserta diskusi yang baru saja menyelesaikan sesi diskusi. Mereka berkumpul di depan ruang-ruang diskusi, menikmati suguhan teh, kopi dan makanan ringan. Namun, salah satu ruang diskusi masih tertutup rapat. Waktu sudah lewat dari jadwal yang ditetapkan panitia yaitu 16:30 WIB, tapi peserta di ruangan tersebut belum menunjukkan tanda-tanda akan mengakhiri sesi diskusinya.

Diskusi tentang pengelolaan kakao lestari adalah salah satu dari empat diskusi yang digelar bersamaan di hari pertama kegiatan Green Prosperity Knowledge Fair 2016 yang dilaksanakan tanggal 13 dan 14 Desember 2016 di Hotel Le Meridien, Jakarta.

Proyek Kemakmuran Hijau Millenium Challenge Account Indonesia yang merupakan kerja sama antar pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat telah berjalan selama kurang lebih tiga tahun. Dalam perjalanan tiga tahun ini ada banyak pengetahuan, praktik-praktik baik (*good practices*) dan inisiatif cerdas (*smart initiatives*) yang dihasilkan dari Proyek Kemakmuran Hijau di target wilayah MCA-Indonesia.

Yayasan BaKTI sebagai Manager Pengetahuan Aktivitas Pengetahuan Hijau Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia memandang penting untuk mendiseminasikan secara luas praktik-praktik baik, inisiatif cerdas, dan pengetahuan yang dihasilkan dari proyek ini melalui Green Prosperity Knowledge Fair. Event berskala nasional ini yang dilaksanakan pada 13 dan 14 Desember 2016 di Jakarta ini

menampilkan ragam inspirasi terkait pembangunan rendah karbon selain juga menampilkan hasil dan capaian yang diperoleh Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia.

Green Prosperity Knowledge Fair dibuka secara resmi oleh Deputy Menteri PPN/BAPPENAS Bidang Pendanaan Pembangunan, Ir. Kennedy Simanjuntak, MA. Dalam sambutannya beliau berpesan agar pengetahuan yang dihasilkan baik dari Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia maupun dari berbagai proyek lainnya benar-benar dapat terdistribusi dan memberi kontribusi nyata bagi kemajuan pembangunan Indonesia.

Green Prosperity Knowledge Fair dihadiri oleh tak kurang dari 300 peserta yang memiliki antusiasme untuk saling bertukar pengetahuan. Mereka adalah para pengambil kebijakan pada tingkat nasional dan daerah, termasuk para prominent figures, praktisi dan pemerhati isu lingkungan hidup, akademisi, jurnalis, serta para penerima hibah Proyek Kemakmuran Hijau. Informasi dan pengetahuan yang dipertukarkan dalam Green Prosperity Knowledge Fair ini menjadi masukan yang relevan bagi Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia dalam perjalannya mencapai tujuan utama.

Galeri Informasi

Selepas membuka secara resmi Green Prosperity Knowledge Fair, Deputy Menteri PPN/BAPPENAS Bidang Pendanaan Pembangunan, Ir. Kennedy Simanjuntak, MA didampingi Deputy Menteri PPN/BAPPENAS Bidang Sarana dan Prasarana, Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA, Direktur Eksekutif MCA-Indonesia, Bonaria Siahaan dan Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI, M. Yusran Laitupa berkeliling meninjau Galeri Informasi.

Galeri Informasi adalah pameran yang menampilkan kisah-kisah sukses dan pengetahuan yang dihasilkan Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia. Sebanyak 15 booth disediakan bagi para mitra Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia untuk memamerkan praktik-praktik baik dan pengetahuan yang berkontribusi pada pembangunan rendah karbon di Indonesia.

Di Galeri Informasi ini peserta GP Knowledge Fair dapat berinteraksi secara langsung dengan para praktisi. Selain mempromosikan kegiatan dan bertukar pengetahuan, peluang-peluang kerjasama atau peluang untuk memperluas kerjasama antar berbagai pihak dalam bingkai Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia juga dapat dimulai dari Galeri Informasi.

Booth-booth dalam Galeri Informasi diatur berdasarkan tema-tema portofolio Proyek Kemakmuran Indonesia. Tema-tema tersebut adalah Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif, Pengelolaan Sumber Daya Alam

Berbasis Komunitas, Pengelolaan Lahan Gambut, Komoditas Lestari. Selain mitra, Galeri informasi ini juga terdapat booth dari MCA-Indonesia, yang menampilkan informasi-informasi dan kegiatan yang telah dilakukan oleh MCA-Indonesia dalam mendampingi mitra mereka untuk mencapai tujuan proyek Kemakmuran Hijau.

Pengetahuan yang disajikan Galeri Informasi ini berasal dari MCA-Indonesia, Yayasan BaKTI, Konsorsium PETUAH, Blue Carbon Consortium, PEKA SINERGI, WWF Indonesia, Yayasan Kalla, LPEM UI, KM Utama dan HiVOS, KEHATI, Konsorsium Euroconsult Mott MacDonald (EMM), dan Portfolio Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia Energi Terbarukan berbasis Komersial dan Komunitas.

Pada Galeri Informasi ini Yayasan BaKTI menampilkan berbagai media informasi yang mereka gunakan untuk berbagi pengetahuan seperti majalah BaKTI News, beberapa komik dan infografis serta DVD berisi film animasi dan film dokumenter.

Konsorsium PETUAH yang merupakan singkatan dari Perguruan Tinggi Untuk Indonesia Hijau menampilkan beberapa kegiatan mereka, termasuk pengumpulan kearifan lokal yang dilakukan oleh Universitas Jambi. Kearifan lokal yang dimaksud adalah Lubuk Larangan, sebuah kesepakatan adat dari sebuah kawasan untuk tidak merusak atau bahkan memanen ikan di satu wilayah tertentu dalam batas waktu yang disepakati.



“Terdapat banyak informasi baru tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Selain itu juga ada banyak pengetahuan tentang hasil-hasil olahan dari alam seperti madu, obat-obatan dan lain-lain

yang baru kita tahu asalnya,” ungkap Halia Asriyani, seorang pengunjung yang merupakan mahasiswi pasca sarjana yang datang khusus untuk melihat langsung Green Prosperity Knowledge Fair 2016.

Panggung Inspirasi

Panggung Inspirasi GP Knowledge Fair menampilkan praktik-praktik baik (good practices) dan individu inspiratif terpilih yang dihasilkan dari Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia. Sebanyak lima praktik baik dari Jambi, Sumba, Lombok dan Sulawesi Selatan ditampilkan di Panggung Aspirasi - GP Knowledge Fair yang menginspirasi dan berbagi tentang karya nyata dalam mendukung pembangunan rendah karbon.

Luna Vidya yang memandu talkshow di atas Panggung Inspirasi mengajak peserta berimajinasi seolah-olah sedang berada di atas sebuah kapal PELNI. “Kita akan berlayar ke Maumere, dan dalam pelayaran ini kita akan saling belajar satu sama lain,” katanya.

Acara bincang-bincang itu dibagi ke dalam tiga sesi. Di sesi pertama naiknya tiga orang inspiratif dari dua tempat berbeda. Mereka adalah ibu Nilawaty dari Yayasan Mitra Aksi Jambi serta duo Armin dan Arman dari Desa Salassae, Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Diskusi interaktif diadakan di setiap akhir sesi untuk membuka kesempatan bagi peserta berdialog dengan para praktisi praktik baik, serta perwakilan pemerintah dan institusi lainnya yang relevan.

Forum Inspirasi terbagi atas dua sesi talkshow. Sesi pertama mengangkat tema Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat dan sesi kedua bertema Pengelolaan Energi Terbarukan Berbasis Masyarakat.

FORUM INSPIRASI



Pada sesi pertama, talkshow mengangkat tema Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat dengan menampilkan Nilawaty dari dari Yayasan Mitra Aksi Jambi serta Armin Salassa dan Arman dari Desa Salassae, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ibu Nilawaty dan rekan-rekannya di Yayasan Mitra Aksi berbagi inspirasi bagaimana mengembangkan pertanian berkelanjutan di lahan gambut yang banyak terdapat di Jambi. Mereka bukan sekadar berteori, tapi turun langsung dan tinggal bersama petani. Yayasan Mitra Aksi punya kegiatan yang diberi nama Sekolah Lapang, tujuannya meningkatkan kapasitas petani di lahan gambut. Di Sekolah Lapang itu petani belajar tentang ilmu tanah, belajar melakukan riset sederhana, serta

belajar mencari tahu akar masalah dalam pertanian mereka dan cara menanggulangnya.

Di Bulukumba, Armin Salassa dan teman-temannya juga melakukan hal yang hampir sama. Mereka mendampingi petani agar lebih berdaya dan mengikuti perkembangan teknologi. Armin dan teman-temannya mendorong petani untuk meninggalkan bahan-bahan kimia dan kembali ke bahan-bahan organik seperti nenek moyang mereka. Hasilnya, panen berlimpah, hasil lebih sehat dan petani lebih makmur.

Di sesi kedua, talkshow membahas Pengelolaan Energi Terbarukan Berbasis Masyarakat, menghadirkan para champion yang berhasil menciptakan solusi dari tantangan energi fosil yang terbatas. Umbu Hinggu dan Teo

dari Wangapu, Sumba Nusa Tenggara Timur. Mereka berdua adalah pengelola koperasi Jasa Peduli Kasih yang sukses mengelola pembangkit listrik menggunakan tenaga air dan angin. Tidak hanya mengelola, mereka juga menjadi supplier energilistrik bagi PLN.

Selain itu juga hadir Basri dan Haryadi dari Pondok pesantren Istidaddarain, Lombok Utara yang berhasil memanfaatkan kotoran manusia menjadi gas dan listrik melalui reaktor bio gas, sehingga bisa menghemat pengeluaran pesantren.

Di akhir sesi, dihadirkan tiga anak muda yang tergabung dalam Garuda Energi Nusantara (GEN Oil). Mereka menjawab keterbatasan energi dengan mengubah minyak jelantah menjadi bahan bakar diesel. Bahan bakar tersebut kemudian mereka distribusikan ke nelayan di pesisir Paotere, Makassar.

Saat mengumpulkan dana di awal usaha mengolah minyak jelantah menjadi biodiesel, mereka sempat dianggap gila dan bahkan ditolak oleh pihak perbankan dan kementerian. Bahan bakar tersebut kemudian mereka distribusikan ke nelayan di pesisir Paotere, Makassar, kota tempat mereka bertiga berdomisili.

Perjalanan mereka bukan perjalanan yang pendek dan ringan, tapi perjalanan panjang berliku. Sempat luntang-lantung di Jakarta ketika mencari dukungan, mereka pun akhirnya mulai mewujudkan ide gila itu dari hasil menggadai beberapa barang milik pribadi yang harganya tidakseberapa.

Untungnya mereka bukan anak-anak muda yang mudah menyerah. Perjalanan berliku itu akhirnya bermuara pada produksi bahan bakar bio diesel yang dirasa cukup membantu para nelayan. "Kami berpikir, kalau cuma demonstrasi dan berteriak saja tentu tidak banyak yang berubah. Kami harus melakukan sesuatu, dan inilah yang kami lakukan," kata Ozy, Direktur Pemasaran dan Humas GEN Oil.

Kesepuluh orang yang diajak naik ke panggung itu adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka bukan orang-orang yang memilih mengumpat atau memaki keadaan, tapi orang-orang yang lebih memilih untuk bekerja, merealisasikan ide menjadi kenyataan dan berkeringat membuat perubahan. Mereka hadir dari latar yang beragam, dari lokasi yang berbeda-beda, dari rentang usia yang berjauhan, tapi dengan semangat yang sama; membuat perubahan.

Roundtable Discussion

Roundtable Discussion membahas portofolio Kemakmuran Hijau (Kakao, Lahan Gambut, Energi Terbarukan Berbasis Masyarakat, Energi Terbarukan Berbasis Komersial, Perhutanan Sosial, Pengetahuan Hijau, dan Perencanaan Penggunaan Lahan Partisipatif /PLUP). Community of Practitioners (CoP) yang dimaksud adalah pemerintah nasional yang terkait, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, mitra pembangunan internasional, komunitas, asosiasi bisnis, akademisi maupun ahli.

Roundtable Discussion ini bertujuan menginisiasi Forum CoP yang dihadiri oleh para penggiat dan praktisi yang memiliki kerja dan kepedulian yang sama di setiap isu portofolio untuk saling melakukan knowledge sharing. Roundtable Discussion juga mendiskusikan persoalan apa yang dapat dijadikan agenda-agenda pembahasan Forum CoP di tahun 2017

atas isu portofolio Green Prosperity Project dan mencari metode yang tepat untuk menjaga knowledge sharing Forum CoP di waktu yang akan datang.

CoP (Community of Practitioners) terdiri dari pemerintah nasional yang terkait, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, mitra pembangunan internasional, komunitas, asosiasi bisnis, akademisi maupun ahli/expert yang bertujuan: a) bagaimana membangun CoP dari para penggiat/praktisi yang memiliki kerja dan kepedulian yang sama di setiap isu portofolio untuk saling melakukan knowledge sharing; b) mendiskusikan persoalan apa yang dapat dijadikan agenda-agenda pembahasan di tahun 2017 untuk menjaga keberlanjutan komunitas (CoP tersebut) di setiap isu portofolio; c) mencari cara/metode/model yang tepat untuk tetap menjaga knowledge sharing forum di antara para



anggota CoP. Diskusi dimoderasi oleh para windows holder dari MCA Indonesia dan juga oleh parapakar.

Hari pertama roundtable discussion terdiri empat tema portofolio yaitu, Pengelolaan Kakao Lestari, Pengelolaan Satu Peta dan Data Spasial, Energi Terbarukan Berbasis Komunitas dan Energi Terbarukan Berbasis Komersil. Masing-masing roundtable discussion diikuti oleh lebih dari 30 orang peserta, bahkan diskusi Energi Terbarukan Berbasis Komunitas menolak penambahan peserta karena telah melebihi kapasitas ruangan. Diskusi berlangsung selama kurang lebih 3 jam, kecuali diskusi dengan tema Pengelolaan Kakao Lestari. Diskusi ini berlangsung lebih dari tiga jam bahkan harus dihentikan oleh moderator meskipun para peserta masih antusias untuk melanjutkan diskusi.

Tujuh diskusi yang digelar dalam dua hari pelaksanaan Green Prosperity Knowledge Fair 2016 ini adalah awal untuk mempertemukan banyak pihak yang punya tujuan sama. Diharapkan diskusi ini akan mengawali diskusi-diskusi lainnya yang lebih tajam dan diharapkan akan berujung pada tindakan lebih nyata. Baik itu tindakan di level pelaksanaan maupun di level regulasi.

Green Prosperity Knowledge Fair 2016 akhirnya secara resmi ditutup hari Rabu, 14 Desember 2016 selepas makan siang. Pertukaran informasi dan pengetahuan dalam dua hari tersebut membawa harapan besar bagi banyak pihak, harapan tentang bagaimana pengetahuan bisa digunakan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Hal ini juga yang ditekankan oleh Poppy Ismalina, Associate Director Pengetahuan Hijau MCA-Indonesia dalam pidato penutupannya.

Menurutnya, pengetahuan bukan hanya dicari, dikoleksi dan dibagikan, tapi bagaimana agar pengetahuan itu bisa dijadikan dasar untuk melakukan sesuatu yang lebih baik bagi Indonesia. Mengutip lagu Memoriosa Kata yang dibawakan Robi Navicula pada acara penutupan Green Prosperity Knowledge Fair, semoga saja semua kata yang terangkum dalam acara ini dapat bermetamorfosa menjadi aksi.

Foto-foto: Syaifullah

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih jauh tentang Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Pengetahuan Hijau di Indonesia, silakan menghubungi email: info@bakti.or.id

Skol Amnasit Membimbing Orang Tua dalam Mengasuh Anak

Budaya orang Timor atau Dawan sangat kaya dengan nilai-nilai moral. Penghargaan terhadap pencipta, alam dan manusia sangat kental dalam kehidupan kesehariannya.

Mendidik anak menjadi pribadi yang tangguh selalu menjadi impian leluhur mereka. Apalagi adalah aset terpenting dalam kehidupan. Namun seiring berjalannya waktu, nilai-nilai yang terkandung dari budaya orang Dawan dalam mengasuh anak mulai tergerus.

Kebanyakan orang Dawan susah membedakan antara mengasuh anak dengan tegas dan keras. Pada akhirnya, anak memenuhi keinginan orang tua bukan karena penghormatan, melainkan karena didorong rasa takut.

Wahana Visi Indonesia di Timor Tengah Utara berinisiatif menerapkan Skol Amnasit atau Sekolah Orang Tua. Di sekolah ini, para orang tua berkesempatan mendapatkan informasi mengenai pola asuh anak berdasarkan nilai-nilai yang diusung budaya lokal orang Dawan. Program ini adalah bagian dari pengembangan Sekolah Ramah Anak mengangkat semangat Ma Top Ma Fit yang berarti bersama bergandengan tangan.

Mengusung semangat Ma Top Ma Fit, program ini menggali kekayaan nilai budaya bersama beberapa keluarga dan tokoh-tokoh adat. Dalam program ini, diperkenalkan kembali lima prinsip yang harus dipegang orang tua dalam mengasuh anak di rumah.

Kelima perinsip itu adalah pertama Neksalit dengan menceritakan cita-cita, harapan atau impian orang tua terhadap karakter positif seperti apa yang akan dimiliki oleh anak-anaknya. Contoh perilaku bertanggung jawab, mandiri, jujur, pekerja keras.

Prinsip kedua adalah Mepukait yakni menceritakan tentang usaha-usaha yang dilakukan orang tua agar anaknya memiliki karakter positif. Seperti penerapan pembiasaan-pembiasaan positif dalam rumah. Misalnya, anak laki-laki mencari pakan ternak, dan anak perempuan memasak. Serta pembuatan dan penerapan jadwal keluarga.

Prinsip ketiga adalah Fainekat yang berisikan tentang nasehat-nasehat yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Nasehat-nasehat ini dipandang sebagai sebuah sarana berkomunikasi antara orang tua dan anak. Bagian ini harus dilakukan berulang-ulang dan orang tua harus memilih waktu yang tepat. Seperti waktu makan malam bersama.

Prinsip keempat adalah Kuma yang berarti materi yang lebih dikontotasikan dengan motivasi. Jika anak-anak tidak melakukan tugasnya, orang tua seharusnya memiliki jurus ampuh berupa bujukan dan rayuan agar anak-anak dengan suka cita menyelesaikan tugasnya. Pada bagian ini, orang tua harus jeli melihat bakat dan hobi anak. Jadi bujukan dan rayuannya dapat berupa melaksanakan bersama-sama kegiatan yang disenangi anak. Bukan memberikan materi yang diminta anak.

Prinsip yang kelima adalah Pules atau memberi pujian. Fase ini termasuk yang paling sulit dilakukan orang Dawan. Dan anak-anak kita sangat miskin dengan pujian, kata-kata pujian sebenarnya selalu diharapkan anak-anak. Anak-anak perlu diberi pujian sebagai apresiasi atas keberhasilan dari usaha yang dilakukan. Apresiasi yang diberikan dapat menumbuhkan kepercayaan diri mereka. Orang tua harus terbiasa dengan memberikan kata-kata positif pada anak.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan orang tua menjadi kaya dalam konsep mengasuh anak di rumah. Tidak lagi menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab ini kepada guru-guru di sekolah.

Kelima prinsip ini kemudian disosialisasikan kembali kepada masyarakat dan orang tua

secara berkala dengan menggunakan metode yang partisipatif seperti diskusi kelompok, *sharing* dan studi kasus.

Serangkaian sosialisasi ini bertujuan agar orang tua bangga, memiliki dan memahami serta mulai menerapkannya dalam keluarga di rumah. Proses evaluasi berjalan bersama sosialisasi, pada pertemuan sosialisasi berikutnya tidak lupa dilakukan evaluasi terhadap penerapan materi pada sosialisasi sebelumnya, termasuk pemecahan kendalanya dan apa pembelajaran yang bisa diambil.

Setelah mengenal 5 prinsip Skol Amnasit, beberapa orang tua yang mengikuti program ini mulai bisa mengasuh anak dengan tegas dan tidak lagi menggunakan kekerasan. Beberapa keluarga sudah membuat dan menerapkan jadwal di rumah untuk anak-anak, sekaligus melaksanakan pembiasaan positif bagi anak-anaknya seperti, membereskan tempat tidur, menyapu halaman rumah, menimba air, mencuci piring, mencari kayu bakar, dan memasak.

Dalam rangka memastikan keberlanjutan konsep Skol Amnasit ini, WVI akan melakukan pendampingan intensif terhadap 10 keluarga per desa di lima desa dampingan di



Timor Tengah Utara. Sebanyak 50 keluarga ini akan menjadi model sekaligus agen perubahan bagi keluarga yang lain. Setiap keluarga model akan dipastikan memiliki jadwal malam bersama keluarga seperti waktu makan malam bersama, waktu belajar, doa, nonton dan waktu tidur.

Dengan demikian setiap keluarga dapat memaksimalkan waktu makan malam bersama anak-anaknya. Meja makan atau pun tikar makan merupakan tempat yang pas buat orang tua mendengar cerita anak-anak, waktu untuk anak mendengar nasehat orang tua dan waktu untuk keluarga membuat rencana bersama.

Jika pola ini berjalan secara konsisten, setiap keluarga akan menghasilkan generasi yang lebih hebat dan tangguh.

PRAKTIK CERDAS
WAHANA VISI INDONESIA
NUSA TENGGARA TIMUR

Pusat Belajar Kakao Jembatan Kesejahteraan Petani

Pada era 1998 hingga 2005, petani kakao di Sikka menjadi petani terkaya karena kejayaan komoditi kakao. Namun saat mengalami masa kejayaan karena harga Kakao menggiurkan, saat yang sama hama dan penyakit sedang mengintai.

Dalam kelengahan dan ketidaktahuan tentang perlakuan Pemangkasan, Pemupukan, Panen sering dan Sanitasi yang penting bagi kakao, petani hanya berprinsip, asal tanam dan berbuah saja. Mereka tidak menghiraukan hama dan penyakit yang membuat produktivitas menurun drastis.

Mulai 2010 hingga 2011, Wahana Visi Indonesia di Sikka mencoba mengembalikan kejayaan petani kakao ini dengan menyeleng-

garakan Sekolah Lapang (SL) Kakao bekerjasama dengan Balai Penyuluh Kecamatan Nita dan PANSU Sumatra Utara (Pertanian Alternatif Sumatra Utara) sebagai fasilitatornya.

Sekolah lapang di tiga demplot di wilayah Kecamatan Nita memberikan hasil yang membangkitkan kembali semangat petani kakao untuk memperbaiki kondisi tanamannya. Melihat hasil baik inilah, maka pada 2012, WVI bersama Yayasan Sahabat Cipta, Pemerintah Daerah Sikka dan PT.

Mars mengembangkan program Support for Poor Small Cocoa Farmers (SPSCF) di Kecamatan Doreng, Bola, Hewokloang, Kewapante, Koting, Nita & Lela.

Program SPSCF mengembangkan sebuah lembaga lokal tempat bernaung para fasilitator kakao yang terdiri dari para petani yang telah dilatih secara khusus selama beberapa bulan guna menjadi fasilitator ahli yang menyediakan jasa informasi perawatan mente yang baik serta sebagai pengelola Pusat Pendidikan & Pelatihan Petani Swadaya (P4S) yang dinamakan dengan CLC (Cacao Learning Center).

Pada 25 Maret 2013, dimulailah peletakan batu pertama pembangunan pusat belajar kakao yang berlokasi di desa Tebuk, Kecamatan Nita. Dan setahun kemudian, tepatnya 20 November 2013 Pusat Belajar Kakao atau Cocoa Learning Center/CLC-yang berdiri diatas lahan seluas 2 ha dengan sistem kontrak ini-diresmikan penggunaannya oleh Bupati Sikka, Drs. Yosep Ansar Rera.

CLC lahir atas pendanaan bersama antara Yayasan Sahabat Cipta dengan WVI. Keberadaan wadah ini sangat mempengaruhi petani kakao. Petani diajari teori hanya 25 persen sedangkan 75 persen adalah praktek, ungkap Yosef Suyandi Benediktus yang dipercayai oleh teman-temannya sebagai Ketua CLC.

CLC ini ada 6 master trainer dan 74 orang petani kunci yang sudah siap menolong petani jika dibutuhkan. Petani terlatih maupun petani kunci sebelumnya adalah petani biasa, namun melalui proyek kemitraan ini, mereka dilatih khusus oleh PT. Mars, sehingga mampu menjadi fasilitator kakao di Sikka.

Hasil dan Perubahan

Fasilitator kakao yang telah terlatih



mengajarkan petani tentang budidaya kakao yang meliputi tanam baru, sambung samping, sambung pucuk, pemupukan, pemangkasan, panen teratur, sanitasi, pembuatan pupuk organik padat (POP) dan Pupuk Organik Cair (POC), pestisida nabati, teknik pengendalian hama dan penyakit, membuat wadah penjemuran ketika musim hujan, akses bibit berkualitas, cara panen, pasca panen hingga memasarkan hasil kakao dengan harga yang wajar.

Lembaga CLC ini telah mendampingi 1.000 petani kakao yang ada di 7 Kecamatan pada Sekolah Lapang yang pertama. Di sekolah Lapang yang kedua, CLC mendampingi sekitar 700 petani kakao. Jadi sudah ada yang bisa menjadi saksi atas kegiatan tersebut sebagai MT & KF dalam mendampingi petani.

Hasil dari pelatihan dan pendampingan ke para petani, baik itu dari segi budidaya, pasca panen hingga ke pemasaran, kualitas dan kuantitas kakao sikka saat ini meningkat. Para petani yang dulunya hanya mendapatkan harga tertinggi Rp. 14.000/kg, namun sekarang bisa memperoleh harga hingga Rp. 35.000/kg, dengan sistem pemotongan harga yang disepakati bersama, jumlah tabungan petanipun meningkat.

Saat ini lebih dari 1.207 KK petani kakao yang menikmati peningkatan harga melalui peningkatan kualitas budidaya kakao dan pemasaran bersama, dan akan semakin bertambah kedepannya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih jauh tentang praktik cerdas di Kawasan Timur Indonesia, silakan menghubungi email: info@bakti.or.id



Inovasi Transportasi Publik Yang Dicintai Warga Kota Makassar

Pengembangan sistem transportasi umum haruslah berorientasi pada manusia. Perhatian khusus seharusnya juga diberikan untuk mengatasi tantangan dalam meningkatkan solusi inovatif.

Oleh **Abd. Rahman Ramlan**

Pada tanggal 16-18 November 2016 bertempat di Hotel Clarion Makassar, UNDP (United Nations Development Program) menggelar lokakarya Perancangan Inovasi Inovasi Publik “Inovasi untuk Transportasi Publik yang Dicintai Warga Makassar” berkolaborasi dengan UN Pulse Lab Jakarta, Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia), dan Dinas Perhubungan Kota Makassar. Lokakarya ini dilaksanakan berdasarkan permintaan dukungan dari Pemerintah Kota Makassar kepada UNDP melalui inisiatif *City-I-LEAPS* dalam upaya untuk mendorong penggunaan layanan transportasi publik dan mengurangi kepadatan jalan.

Lokakarya dihadiri kurang lebih 35 orang peserta yang berasal dari ragam profesi seperti Staf Dishub, Pendidik, Pegiat Startup, Komunitas Kreatif, Organisasi Angkutan Darat, Akademisi, pemerhati transportasi dan bahkan penyandang disabilitas. Selama 3 hari mereka berdiskusi dan bekerjasama menggagas dan membuat *prototype*/purwarupa ide solusi pemecahan tantangan yang diangkat dari 3 tema utama lokakarya, yaitu menyesuaikan Sarana



Transportasi Publik dengan Kebutuhan Penggunanya; Mendorong Perubahan Perilaku Pengguna Jalan; dan Penggunaan Informasi untuk Memberikan Pelayanan Transportasi yang Lebih Baik.

Melalui metode Pengembangan Inovasi Berbasis Manusia, peserta lokakarya Perancangan Inovasi Transportasi Publik diajak berdiskusi produktif untuk melihat perspektif pengguna sistem angkutan umum saat ini, dan mengidentifikasi cara dan sarana untuk memperbaiki serta meningkatkan penggunaan sistem transportasi umum, juga mengidentifikasi solusi inovatif untuk meningkatkan sistem transportasi secara bertahap. Pada akhirnya akan dilakukan inkubasi solusi melalui uji coba purwarupa, serta mendukung administrasi kota dan Dishub untuk mengadopsi dan menaikkan skala purwarupa yang berhasil.

Salah seorang peserta dari perwakilan guru, bernama Yasmira menyampaikan kesannya yang mendalam atas kegiatan lokakarya. “Saya senang sekali bisa ikut lokakarya ini. Belum pernah saya mengikuti kegiatan seperti ini. Saya suka metodenya, mampu mendorong peserta mengeluarkan gagasannya tanpa kuatir ditolak. Kebetulan saya seorang guru sekolah, saya akan

mengadopsi metode ini dalam proses belajar mengajar di sekolah,” ungkapnya.

“Terima kasih banyak untuk kesempatan baik ini. Saya mengapresiasi Panitia yang memperhatikan kaum disabilitas. Semoga, transportasi umum kita kedepannya lebih manusiawi dan memberi keadilan pada semua,” ungkap Hamzah, peserta yang juga Pengurus Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Mario dalam sambutan penutupannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh peserta yang telah memberikan sumbangsih solusi pada perbaikan layanan transportasi publik di Makassar. Secara khusus, Mario memuji metode pelaksanaan workshop yang sangat partisipatif.

Menurut Mario bahwa pasca workshop akan dilanjutkan dengan proses inkubasi. Beberapa purwarupa yang terpilih akan dilakukan proses pendalaman dan pengembangan sehingga akan lahir sebuah inovasi yang bisa merubah wajah transportasi di kota Makassar.

Sebelumnya, Asisten I Pemerintah Kota Makassar, H Muh Sabri mewakili Walikota Makassar dalam sambutan Pembukaan menyampaikan harapannya agar Lokakarya dapat membantu memberi solusi inovatif bagi perbaikan layanan transportasi publik di Makassar.

“Arus barang dan orang yang naik-turun di Makassar *New Port* dan Bandara akan memicu kemacetan lalu lintas di kota Makassar. Dengan penambahan kapasitas baik MNP maupun Bandara, maka titik temu dari aktivitas kendaraan yang mengangkut barang dari dua lokasi itu akan bertemu di Jalan Perintis Kemerdekaan, Urip Sumoharjo, dan Andi Pettarani,” urainya.

Konsep PASIKOLA

Konsep ini adalah satu dari tiga konsep purwarupa yang diinkubasi. PASIKOLA adalah singkatan dari Pete-pete Pasikola (anak sekolah), sebuah konsep tentang hadirnya kendaraan umum yang dapat mengantar jemput anak-anak sekolah.

Konsep ini lahir dari pengamatan atas perilaku anak-anak sekolah yang menggunakan kendaraan pribadi ke sekolah. Selain belum cukup usianya untuk mengendarai kendaraan,

juga sering ditemui geng motor yang beranggotakan anak-anak sekolah yang berdampak pada munculnya berbagai tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat. Konsep ini juga muncul untuk membantu meringankan beban orang tua yang harus meluangkan waktu antar jemput anaknya, sehingga pada jam-jam tertentu di beberapa sekolah yang berada di tepi jalan umum terjadi kemacetan karena menumpuknya mobil pribadi penjemput.

Secara operasional konsep ini akan menghadirkan sebuah simbiosis mutualisme antara pihak sekolah, orang tua dan pemilik kendaraan termasuk sopir. Sistem kerjasama ini memberikan peluang bagi para sopir untuk memperoleh jaminan pendapatan yang tetap setiap bulannya, sehingga tidak ngebut dan ugul-ugalan di jalan untuk mengejar setoran. Selain itu juga, Mobil Pasikola akan menghadirkan perilaku sopir yang lebih bertanggungjawab, karena dibekali oleh sistem monitoring dan pengawasan yang jelas dari pihak sekolah dan orang tua siswa.

Oleh karena itu, untuk menghadirkan mobil Pasikola diperlukan adanya kesepakatan bersama di antara 3 pihak yakni sekolah, orang tua dan sopir. Sikap saling percaya akan menjadi kunci terwujudnya kerjasama itu. Dari pihak pemerintah, diharapkan ada regulasi yang memberi ruang berupa jalur khusus-tempat beroperasinya Mobil Pasikola.

Konsep Feeder System

Feeder System adalah sistem dimana trayek padat yang selama ini digunakan oleh kurang lebih 4000-an pete-pete diurai dan diarahkan ke dalam pemukiman. Di dalam pemukiman ini kemudian pete-pete bertindak sebagai feeder yang mengumpan penumpang ke terminal BRT yang ada di pasar, sekolah dan mall.

Prasyaratnya adalah di area pemukiman disiapkan shelter, sementara di Mall, Pasar, Sekolah disediakan Terminal BRT. Kemudian diperlukan perbaikan fasilitas sarana mobil Pete-pete dan Bentor (Becak Motor) demi kenyamanan dan keamanan penumpang. Demikian pula prasarana shelter dan terminalnya.

Sistem Informasi Jadwal BRT

Konsep purwarupa ini menawarkan tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh



pengguna serta mudah diakses baik secara on line maupun off line. Konsep ini berangkat dari pengalaman pengguna BRT sebelumnya yang mengalami kesulitan memperoleh informasi terkait jadwal kedatangan dan keberangkatan Bus. Demikian pula di Halte tidak ada petunjuk terkait jadwal tersebut.

Konsep penyediaan informasi secara on line akan menggunakan aplikasi di smartphone. Sejumlah data dan informasi terkait BRT seperti peta rute dan posisi BRT tersedia secara realtime. Sementara penyediaan informasi "off line" dimaksudkan sebagai upaya pemberian informasi secara langsung melalui penyediaan brosur atau buku saku, serta penayangan di layar monitor-LED yang ada di Halte BRT. Konsep ini



Foto: Sofyan Syamsul

juga mendorong sistem pembayaran non tunai menggunakan SmartCard.

Dukungan UNDP Untuk Transportasi Publik Makassar

Dengan jumlah penduduk sekitar 1,7 juta orang pada tahun 2015, Kota Makassar sangat berkeinginan untuk memperbaiki sistem transportasi publiknya. Pada tahun 2015, Makassar mengembangkan Perencanaan Utama Transportasi untuk membangun sistem transportasi terintegrasi untuk mengatasi kemacetan dan memperbaiki transportasi publiknya.

Masih ada tantangan dalam mengembangkan sistem transportasi umum yang berorientasi pada masyarakat di Kota Makassar. Kurangnya

data yang relevan dan terkini mengenai pola mobilitas, kebutuhan pengguna, berbagai jenis transportasi publik yang tidak dapat diandalkan, kurangnya informasi tentang tantangan penyedia layanan, ketidaksesuaian antara permintaan dan penyediaan transportasi, kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kota untuk meningkatkan rute (khususnya BRT), dan lain-lain. Selain itu, pemerintah kota masih dalam tahap perencanaan Pete-Pete SMART dan baru berencana untuk uji coba purwarupa.

Mempertimbangkan hal tersebut UNDP Asia tertarik memberikan pendampingan terhadap Kota Makassar dalam merealisasikan sistem manajemen transportasi.

"Kita tertarik untuk membantu administrasi di kota Makassar terutama untuk membantu agar bisa menjalankan inovasi-inovasi baru di bidang transportasi publik," ujar Governance Specialist, UNDP Bangkok Regional Hub, Paavani Reddy di Makassar, saat diterima Wali Kota Makassar di kediamannya (13/09/2016).

Dia mengatakan, Pemerintah Kota Makassar saat ini sedang fokus dalam pengembangan sistem transportasi massal mengingat pesatnya laju penduduk disertai dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Makassar, kata dia, berdasarkan laporan dari Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dan pengamatannya sendiri di lapangan, memang merupakan salah satu kota metropolitan yang tersibuk dan berkembang.

"Makassar adalah kota metropolitan yang sedang berkembang pesat. Kemacetan menjadi salah satu masalah bagi kota-kota besar dan inilah yang sedang diusahakan oleh pemerintah kota untuk mencari solusinya," katanya.

UNDP sendiri, lanjut Paavani, akan melakukan pendalaman lebih jauh lagi baik dengan mendengarkan langsung penjelasan wali kota maupun mengumpulkan informasi yang didapatkan dari masyarakat. Inspirasi dan cerita-cerita serta pengalaman masyarakat tentang transportasi yang mereka rasakan inilah nantinya yang akan dijadikan basis tentang inovasi yang hendak dijalankan bersama Pemkot Makassar.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih jauh tentang Program ini, silakan menghubungi email: info@bakti.or.id



**Kisah Kalabia
di Raja Ampat**

SEBUAH PRAKTIK CERDAS DARI PAPUA

Di kepulauan Raja Ampat, anak-anak menghabiskan waktunya bermain di pesisir. Mereka berlari di pasir, melompat, menyelam, berenang, dan memanjat pohon bakau. Laut adalah rumah dan halaman. Jadi menjaga laut adalah menjaga tempat tinggal.

Perkenalkan Kapal Kalabia. Kapal dengan tonase 121 GT dan panjang 32 meter, lambungnya dipenuhi grafiti bergambar hewan-hewan laut. Ada lumba-lumba, terumbu karang, penyu, dan tentu saja ada kalabia. Sejatinya, Kalabia adalah sebutan Suku Maya, penduduk asli Raja Ampat, untuk hiu bambu (*Chiloscyllium punctatum* atau *walking shark*). Jenis hiu endemik Papua Utara ini bisa berjalan di dasar laut dengan siripnya.

Hari itu, Kalabia berlabuh dengan anggunnya di sebuah kampung bernama Kasim Sele di Pulau Kasim. Kalabia menjadi nama sebuah kapal pendidikan konservasi yang memiliki ruang pertemuan, perpustakaan, peralatan audio visual, dan 24 tempat tidur. Kegiatan pendidikan konservasi di atas kapal ini pertama kali diinisiasi oleh *Conservation International* (CI) dan *The Nature Conservancy* (TNC) sejak Februari 2008 dan Kampung Saonek di Kabupaten Raja Ampat menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Kapal Kalabia.

Kalabia melakukan perjalanan dari pulau ke pulau di Kabupaten Raja Ampat dengan misi pendidikan konservasi. Ia membawa tenaga pengajar, buku-buku, dan peralatan bermain serta memberikan pemahaman pada anak-anak di sana tentang lingkungan mereka, tentang ekosistem laut, terumbu karang, pantai dan mangrove.

Awak Kalabia semua adalah orang lokal yang berjumlah tujuh orang dan tenaga pengajarnya lima orang. Motto Kalabia adalah Berlayar Sambil Belajar. Dalam setiap

Merapat di kampung Kasim Sele di Pulau Kasim. Di sini, Kapal Kalabia bisa melabuh selama 3 sampai 5 hari. Kapal ini terus mengarungi lautan di kepulauan Raja Ampat, singgah diberbagai kampung dan hingga tahun 2012, telah menjangkau 6000 anak.



kali trip, Kalabia membutuhkan sekitar 20 hari. Kalabia singgah di setiap kampung selama 3-5 hari. Hingga tahun 2012, Kalabia telah mengunjungi semua kampung di kepulauan Raja Ampat dan menjangkau sekitar 6000 anak.

Dalam kerjanya, kapal Kalabia menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo 2) Tanjung Priok Jakarta, pada tahun 2012 berkomitmen membantu dengan anggaran sebanyak 27 miliar rupiah untuk biaya operasional selama lima tahun. Di tahun yang sama, Kalabia yang semula menerima dukungan dari Conservation International dan The Nature Conservancy memulai kerja sama dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Kalabia pun bertransformasi menjadi lembaga independen bernama Yayasan Pendidikan Kalabia.

Berbagi ilmu untuk penjaga laut masa depan

Di Kapal Kalabia, puluhan anak Sekolah Dasar terlihat mengikuti kegiatan belajar di geladak. Mereka sedang menikmati senja sebelum orang tua mereka mencari dan memintanya pulang ke rumah. "Saya suka Kalabia. Saya suka belajar disini," kata Yunus Seim siswa kelas 5 SD Negeri 48 Kasim Sele. Dalam mengemban misi

pendidikan konservasi, Kalabia memfokuskan kegiatan belajar-mengajar pada siswa Sekolah Dasar Kelas 4 dan 5.

Mengapa Kalabia membagi pengetahuan pada anak-anak usia Sekolah Dasar? "Mereka adalah generasi muda yang pada 20 tahun mendatang akan bekerja dan menjadi pengambil kebijakan. Dan anak-anak ini harus memiliki wawasan lingkungan yang baik," kata Albert Nebore, salah seorang pendiri Yayasan Kalabia. Data yang dirilis Conservation International melalui beberapa peneliti yang telah mengunjungi Teluk Cendrawasih, Kepulauan Raja Ampat, dan Teluk Kaimana menunjukkan tingginya keanekaragaman laut di daerah-daerah tersebut, dimana terdapat setidaknya 1.700 jenis ikan karang. Hasil pendataan biota laut menunjukkan terdapat 1.500 jenis ikan karang dan 600 jenis terumbu karang di Kepulauan Raja Ampat saja. Jumlah tersebut adalah sekitar 75 persen dari seluruh terumbu karang yang ada di dunia.

Pengetahuan akan ancaman yang dihadapi laut dan kehidupan di dalamnya inilah yang disebarkan Kalabia bersama dengan pengetahuan akan peran penting mereka bagi keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan hidup manusia. Para pengajar Kalabia mengajak



anak-anak menyelam, mengenali terumbu karang, bermain di pantai dan mangrove serta mengenal beragam tumbuhan dan satwa yang hidup di sana.

Ancaman bersembunyi di balik keindahan

Memandang keindahan bukit-bukit karst Raja Ampat yang menyembul dari laut nan biru dari puncak Piainemo, mengingatkan pada idiom: Tuhan menciptakan kepulauan Raja Ampat saat tersenyum. Namun perjalanan dengan speed boat dari Sorong ke Piainemo terhenti beberapa kali karena baling-baling perahu terbelit sampah plastik. Tidak sedikit sampah plastik terlihat mengapung di permukaan laut sepanjang perjalanan mengitari Raja Ampat. Sampah ini berupa kemasan makanan ringan hingga botol minuman. “Inilah yang menjadi kekhawatiran kami di Saonek kami hanya tahu membakar sampah, belum ada tempat sampah dan tempat pembuangan akhir sampah. Namun saat ini sudah dianggarkan dalam rencana desa untuk pembuatan tempat sampah di sepanjang jalan,” kata Sekretaris Desa Saonek, Muhammad Syahrir. Tingginya keanekaragaman hayati di Raja Ampat juga menghadapi ancaman yang tinggi. Pertama adalah desain infrastruktur, seperti

pembangunan akses jalan yang berada di pesisir. Pesisir yang landai atau yang berbukit dengan banyak singkapan tanahnya, akan mengakibatkan longsoran-longsoran kecil, yang muaranya akan ke laut dan mengancam kehidupan terumbu karang. Kedua, ilegal logging atau pembukaan lahan yang masih sangat tinggi yang berdampak pada meningkatnya aliran sedimen sungai yang terbawa ke laut. Ancaman lainnya adalah praktek penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan racun.

Tak dapat dipungkiri, tingginya keanekaragaman hayati dan tingkat kunjungan wisata serta terbukanya akses ke Raja Ampat berkontribusi pada semakin dibutuhkannya pengelolaan sampah dan pengelolaan wisata yang ramah lingkungan. Kalabia melihat hal itu, maka dalam kurikulum pengajarannya pengelolaan sampah dan konservasi ekosistem menjadi bagian penting.

Menciptakan model belajar anak-anak pulau

Belajar dengan alam terbuka sambil bermain merupakan model belajar yang digemari anak-anak. Di Kalabia, anak-anak yang belajar sambil bernyanyi dan bermain. Di Kasim Sele, sekitar 30 anak terlihat begitu bersemangat mengikuti

kegiatan di Kapal Kalabia dari pagi hingga sore.

Hal-hal yang dipelajari di Kapal Kalabia ada dalam sebuah Buku Saku Kalabia atau Buku Paspor Kalabia. Buku Paspor Kalabia dibagikan kepada semua anak yang belajar di Kapal Kalabia. Di dalamnya terdapat materi pengenalan jenis biota laut dan ekosistem, pengelolaan sampah, materi aktivitas siswa, seperti mewarnai, teka-teki, dan beberapa lagu. Anak-anak dapat membandingkan biota laut yang ditemuinya langsung saat menyelam dengan gambar yang ada di buku Paspor Kalabia. Anak-anak juga dapat membaca informasi tentang bahaya yang dapat ditimbulkan sampah plastik terhadap terumbu karang dan biota laut lainnya, seperti teteruga atau penyu.

Mereka memainkan permainan menjadi terumbu karang. Sebanyak enam orang anak dibungkus kain yang berlobang, tangan mereka yang menggunakan kaos tangan bergoyang seperti mengepal dan membuka. Begitulah cara terumbu karang hidup dan mendapatkan makanan. Yodias Abraham kelas 5 SD Negeri 48 Kasim Sele, sangat menikmati permainan itu. "Tidak bosan toh. Kita tidak duduk terus di bangku," katanya.

Menjelang pukul 15.00 kelompok belajar anak-anak ini, mulai menggambar. Setiap anak diberikan satu kaos putih, kuas dan pensil. Yunus Seim siswa kelas 5 SD Negeri 48 Kasim Sele, dengan penuh hati-hati menggoreskan pensilnya di atas permukaan kain. Ia menggambar ikan dan bintang laut. "Saya suka ikan, enak dimakan. Dan banyak," katanya. "Apakah kau akan menjaga ikan di laut?" "Dijaga toh. Yang besar boleh dimakan, yang anak tra boleh," kata Yunus Seim.

Model belajar ini akhirnya dilirik beberapa orang. Pada tahun 2011, beberapa peneliti kelautan dari Brasil menyambangi Kalabia. Para peneliti itu belajar dan mulai mengadopsi kurikulum belajar untuk anak-anak pesisir di Brasil. Sementara lembaga WWF yang beroperasi di Teluk Cendrawasih juga mengadopsi sistem kerja Kalabia. WWF menggunakan kapal-kapal kecil



dan mendatangi pulau-pulau dan menyambangi anak-anak untuk menyebarkan pengetahuan. Tak hanya itu, beberapa provinsi di Indonesia, juga telah merencanakan model pembelajaran yang sama di daerah masing-masing.

Dampak kehadiran Kalabia

Pengenalan akan bahaya sampah kepada anak-anak, pelan-pelan membawa perubahan. Di kampung Sawingrai, masyarakat bersama tokoh adat membuat aturan. Warga atau pengunjung yang kedapatan membuang sampah sembarangan akan mendapatkan denda sebesar



50 ribu rupiah. Hal lain juga terjadi pada 2011, saat sebuah festival diadakan di salah satu kampung di kepulauan Raja Ampat. Beberapa pengunjung yang hadir karena kegerahan meneguk air mineral dalam kemasan. Dan sisa botolnya dibuang ke laut. “Tiba-tiba ada adik-adik yang spontan melompat ke laut. Mengambil botol plastik itu,” kata Mery.

Kisah lain juga terjadi di kampung Warwanai. Saat seorang nelayan menangkap seekor penyu

dan mengurungnya di pinggir pantai. Anak-anak yang melihatnya dengan mengendap-endap pada malam harinya membuka kurungan dan melepaskan penyu itu kembali ke laut. Saat ditanya oleh Kepala kampung mengapa mereka melakukannya, mereka menjawab “Kenapa penyu ditangkap. Nanti kalau penyu habis, siapa lagi yang makan ubur-ubur di laut,” kata anak-anak itu dengan polos. “Kata kaka-kaka di Kalabia. Penyu itu baik tidak jahat.”

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih jauh tentang Praktik Cerdas ini, silakan menghubungi email: info@bakti.or.id

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PROGRAM MAMPU

Oleh
M. Ghufan H. Kordi K

Tahun 2015 merupakan penghujung berakhirnya Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals, MDGs*) yang dimulai pada awal tahun 2000. MDGs bertujuan menghapus kemiskinan dan kelaparan di muka bumi. Dan sejak akhir September 2015, setelah bekerja lebih tiga tahun, 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan kesepakatan baru yang disebut Tujuan Pembanguna Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals, SDGs*) dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

Sebagai dokumen kesepakatan, SDGs dibuat sebagai pengganti MDGs yang berakhir pada tahun 2015. Kesepakatan global, seperti MDGs dan SDGs merupakan bentuk norma-norma dan standar-standar internasional. Meski tidak mengikat secara hukum, kesepakatan tersebut akan mengikat secara sosial dan konvensional. Warga negara akan menagih, media massa akan melaporkan, dan PBB setiap tahun akan meminta laporan pertanggungjawaban setiap negara yang menandatangani.

Perempuan dan Kemiskinan: Dari MDGs ke SDGs

Tujuan-tujuan dalam dokumen MDGs yang mulai diberlakukan tahun 2000 memberi perhatian pada perempuan dan kemiskinan. Kemiskinan dan kelaparan merupakan momok yang menakutkan seluruh dunia. Badan Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization, FAO*) memperkirakan terdapat sekitar 40 juta penduduk dunia mengalami kelaparan akut sepanjang tahun 2008. Krisis ekonomi dunia pada akhir tahun 2008 dan sepanjang 2009-2013 akan menambah jumlah penduduk dunia yang kelaparan mencapai 963 juta jiwa. Sekitar 65 % dari jumlah yang kelaparan tersebut berada di tujuh negara yaitu Indonesia, China, India, Kongo, Bangladesh, Pakistan, dan Etiopia.

Target MDGs adalah menurunkan separuh kemiskinan di dunia. **Tujuan 1 adalah Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.** Target dari Tujuan 1 adalah menurunkan 50 persen penduduk miskin dan penduduk yang kelaparan (Tabel 1). Namun, banyak negara telah menurunkan jumlah kelaparan hingga di bawah 50 persen sebelum MDGs dicanangkan.

Sedangkan **Tujuan 3 adalah Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan**. Target dari Tujuan 3 adalah menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan, serta di semua jenjang pendidikan. Untuk pendidikan dasar dan lanjutan, jumlah perempuan yang duduk di bangku pendidikan semakin tinggi. Di banyak negara, termasuk Indonesia, jumlah perempuan yang memasuki pendidikan dasar dan lanjutan semakin tinggi. Namun tingginya tingkat pendidikan yang dicapai perempuan belum berkorelasi positif dengan, misalnya menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan.

Dokumen MDGs pada Tujuan 3 tidak menargetkan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan, termasuk berbagai praktek yang merugikan perempuan. Walaupun diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan telah mendapat perhatian global melalui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms Discrimination Against Women, CEDAW*) 1979, kesepakatan-kesepakatan global juga masih mengabaikan tindakan bersama untuk mengurangi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

TABEL 1. PERBEDAAN ANTARA MDGs DAN SDGs

MDGs 2000-2015	SDGs 2015-2030
<p>50 PERSEN</p> <p>50 persen Target dan sasarannya adalah separuh: mengurangi separuh kemiskinan. Target yang terlalu minimal. Banyak negara telah terlebih dahulu mencapainya</p>	<p>100 PERSEN</p> <p>Target dan sasarannya adalah semua, sepenuhnya, dan tuntas</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mengakhiri kemiskinan ■ Seratus persen penduduk memiliki akta kelahiran ■ Memerlukan fokus, untuk merangkul mereka yang terpinggir dan terjauh
<p>DARI NEGARA MAJU, UNTUK NEGARA BERKEMBANG</p> <p>MDGs mengandaikan bahwa negara miskin dan berkembang yang mempunyai pekerjaan rumah. Sementara itu negara maju mendukung dengan penyediaan dana</p>	<p>BERLAKU UNIVERSAL</p> <p>SDGs memandang semua negara memiliki pekerjaan rumah. Tiap-tiap negara wajib mengatasinya. Tiap-tiap negara harus bekerjasama untuk menemukan sumber pembiayaan dan perubahan kebijakan yang diperlukan</p>
<p>DARI ATAS (TOP DOWN)</p> <p>Dokumen MDGs dirumuskan oleh para elit PBB dan OECD di New York tanpa melalui proses konsultasi atau pertemuan atau survei warga</p>	<p>DARI BAWAH (BOTTOM UP) DAN PARTISIPATIF</p> <p>Dokumen SDGs dirumuskan oleh tim bersama dengan pertemuan tatap muka di lebih dari 100 negara dan survei warga</p>
<p>SOLUSI PARSIAL ATAU TAMBAL SULAM</p> <p>8 Tujuan MDGs sebagian besar hanya mengatasi gejala-gejala kemiskinan saja. Masalah ekologi dan lingkungan hidup tidak diakui. Ketimpangan tidak mendapatkan perhatian. Demikian halnya dengan soal pajak dan pembiayaan pembangunan</p>	<p>SOLUSI MENYELURUH</p> <p>Berisi 17 Tujuan berupaya merombak struktur dari sistem</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kesetaraan Gender ■ Tata pemerintahan ■ Perubahan model konsumsi dan produksi ■ Perubahan sistem perpajakan ■ Diakuinya masalah ketimpangan ■ Diakuinya masalah perkotaan

Sumber: Hoelman et al, (2015)

Bagaimana dengan SDGs? Menurut Bahagijo (2016) MDGs dan SDGs berbeda dalam konteks dan teks yang diuraikan dalam beberapa segi antara lain: (a) jumlah Tujuan dan Target; (b) proses perumusan; (c) asumsi pendanaan; serta (d) skala dan ambisi perubahan yang dicanangkan. Dari segi Tujuan, ada empat hal yang layak dicatat, yaitu kesetaraan gender;

penurunan ketimpangan; perubahan pola konsumsi dan produksi dan berbagai tujuan ekologi lainnya; serta tata pemerintahan yang inklusif dan anti korupsi. Keempat hal itu, yang tidak ada dalam MDGs, mencanangkan skala perubahan lebih luas, sistemik, dan struktural (wholesale change), serta melakukan pergeseran radikal dalam pendekatan pembangunan.

Yang menarik adalah Tujuan 16 SDGs mengenai Perdamaian dan Tata Pemerintahan. Tujuan ini memasukkan aspek prosedur dan tata cara—tidak boleh ada korupsi, diskriminasi, dan kekerasan dalam masyarakat. MDGs tidak memiliki tujuan seperti itu. Sedangkan SDGs dengan mencantumkan Tujuan 16 sangat jelas hendak mengawinkan keadilan substansi (substantive justice) dan keadilan prosedural (procedural justice). Pada aspek itu pula penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan martabat manusia menjadi sebuah kewajiban dan keharusan. Pemerintah wajib memperlakukan setiap warga negara apa pun latar belakangnya dengan *equal concern* dan *equal respect* (Bahagijo, 2016).

SDGs menempatkan permasalahan kemiskinan dan perempuan pada posisi yang penting, strategis, dan komprehensif. Tujuan 1 dan Tujuan 2 pada SDGs secara jelas menempatkan pengakhiran kemiskinan dan kelaparan lebih komprehensif dengan target-target yang terukur. Sedangkan Tujuan 5 adalah mengupayakan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.

Selain kesetaraan gender yang ditempatkan pada Tujuan 5, jika diperhatikan secara cermat, maka Kesetaraan juga ditemukan pada Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, Tujuan 6, Tujuan 7, Tujuan 8, dan Tujuan 10. Tujuan 5 dan Tujuan 16 tentang Kebebasan, sedangkan Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 14, dan Tujuan 15 mengenai Ekologi. Ekologi menempati kedudukan utama karena SDGs merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dan mandat Konferensi Rio+20 yang memandatkan agenda pembangunan seimbang bukan hanya mengutamakan kemajuan sosial-ekonomi saja, tetapi juga ketersediaan ekologi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

SDGs yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2016 itu mempunyai 17 Tujuan dan 169 Target. Tujuan dan Target SDGs dipilah ke dalam 5 kategori besar, yaitu rakyat (*people*), planet (*planet*), kemakmuran (*prosperity*), perdamaian (*peace*), dan kemitraan (*partnership*).

Tema MAMPU dan Dokumen SDGs

Tema Program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) disusun menjelang berakhirnya MDGs. Lima

tema MAMPU (Tabel 2) diharapkan memberi dampak besar pada kemajuan dan pemberdayaan perempuan. Tema 1 Membuka akses perempuan miskin kepada program perlindungan sosial merupakan tema dengan cakupan yang sangat luas. Perlindungan sosial mencakup semua pelayanan publik, terutama yang disediakan oleh negara.

Tema 2 Membuka akses perempuan kepada pekerjaan dan penghapusan diskriminasi di tempat kerja, diharapkan membuka ruang yang lebih luas terhadap perempuan dalam mengakses lapangan pekerjaan, termasuk tidak mendiskriminasi perempuan dari sisi apa pun. Tema 3 Meningkatkan kondisi tenaga kerja perempuan yang ke luar negeri, dimaksudkan untuk menempatkan perempuan sejak awal, mulai dari disiapkan menjadi pekerja migran yang legal dan selalu berada dalam perlindungan negara. Dalam konteks perlindungan, negara juga menyiapkan dan memfasilitasi kemampuan pekerja migran sesuai dengan kebutuhan negara tujuan.

Tema 4 Meningkatkan kepemimpinan perempuan untuk kesehatan reproduksi yang lebih baik, juga merupakan bagian dari Tema 1. Namun, Tema 4 mengkhususkan pada kesehatan reproduksi, karena tidak hanya menyangkut alat-alat reproduksi semata, tetapi juga menyakut relasi gender yang menempatkan perempuan pada posisi inferior dan tidak menguasai reproduksinya. Tema 5 Meningkatkan kepemimpinan perempuan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan, terkait dengan diskriminasi, karena diskriminasi melahirkan kekerasan dan ketidakadilan. Tema 5 mencakup kekerasan yang lebih luas, tidak hanya mencakup kekerasan fisik, seksual, psikis, dan ekonomi, tetapi juga termasuk pengabaian negara terhadap perempuan.

Lima tema MAMPU bersesuaian atau sejalan dengan Tujuan dan Target SDGs. Sebagai program yang fokus pada perempuan dan kemiskinan, maka dua Tujuan SDGs menjadi relevan dengan Program MAMPU, yaitu Tujuan 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, dan Tujuan 5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Karena Tujuan dan Target SDGs sangat luas dan komprehensif, maka tema-tema MAMPU juga ditemukan pada berbagai Tujuan dan Target

SDGs (Tabel 2). Tema 1 pada Program MAMPU yang merupakan tema dengan cakupan yang sangat luas, relevan dengan Tujuan 1 (Target 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), Tujuan 2 (Target 2.1, 2.2, 2.3), Tujuan 3 (Target 3.4, 3.5, 3.8), Tujuan 4 (Target 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a), Tujuan 11 (Target 11.1, 11.2, 11.5, 11.7), dan Tujuan 16 (Target 16.9). Tujuan 16 pada Target 16.9 mengenai akta kelahiran.

Tema 2 pada Program MAMPU relevan dengan Tujuan 5 (Target 5.4, 5.5, 5.a), Tujuan 8 (Target 8.5, 8.10), dan Tujuan 10 (Target 10.2, 10.3, 10.4). Tema 3 Program MAMPU relevan dengan dua tujuan pada SDGs, yaitu Tujuan 8 dan Tujuan 10. Target 8.8 Pada Tujuan 8 adalah Melindungi hak-hak pekerja dan mendukung lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, khususnya bagi perempuan buruh migran, dan pekerja dalam situasi genting. Sedangkan Target 10.7 pada Tujuan 10 adalah memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang tertata, aman, teratur dan bertanggung jawab, termasuk melalui implementasi kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.

Tema 4 Program MAMPU relevan dengan Tujuan 3 (Target 3.1, 3.2, 3.3, 3.7) dan Tujuan 5 (Target 5.6), sedangkan Tema 5 Program MAMPU relevan dengan Tujuan 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.c) dan Tujuan 16 (16.1, 16.2, 16.3, 16.10).

Jika tema-tema pada Program MAMPU tersebut menjadi program atau menjadi kegiatan, maka akan berkontribusi pada Tujuan-tujuan SDGs sebagaimana telah disajikan pada Tabel 2. Karena Program MAMPU telah berjalan sekitar empat tahun (sejak 2013), maka telah berkontribusi kepada Tujuan dan Target SDGs, namun kontribusi tersebut perlu diukur dengan metode-metode yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara akademik maupun sosial.

SDGs memancang Tujuan dan Target 100 %, sementara pendanaan untuk implementasi SDGs diletakkan pada kemampuan dan kapasitas fiskal negara bersangkutan. Karena itu, sebagaimana Tujuan 16 SDGs juga menuntut institusi publik bekerja secara terbuka dan inklusif. Itulah yang membedakan SDGs dan MDGs yang sama sekali tidak memiliki tujuan dan target seperti SDGs. Metode dan cara kerja pemerintahan juga dilakukan dengan secara baru agar pemerintah dan lembaga non-pemerintah bekerja dan memastikan tanpa korupsi, tanpa diskriminasi dan tanpa kekerasan. Oleh Bahagijo (2016) menyatakan bahwa, SDGs memerlukan dan menuntut tiga perubahan, yaitu: (1) perubahan paradig dan kebijakan; (2) perubahan kelembagaan dan tata kerja kelembagaan; dan (3) perubahan pada level operasi atau implementasi.

TABEL 2. TUJUAN DAN TARGET SDGs YANG RELEVAN DENGAN TEMA MAMPU

TEMA MAMPU	TUJUAN SDGs DAN TARGET YANG RELEVAN
MEMBUKA AKSES PEREMPUAN MISKIN KEPADA PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL PEMERINTAH	TUJUAN 1 MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN TARGET 1.1 Mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang dimanapun. TARGET 1.2 Mengurangi setidaknya separuh proporsi dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak segala umur yang hidup dalam kemiskinan. TARGET 1.3 Mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi semua level, dan pada tahun 2030 telah menapai cakupan yang cukup substansial terhadap yang miskin dan rentan. TARGET 1.4 Memastikan semua laki-laki dan perempuan, terutama yang miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber-sumber ekonomi, pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk kekayaan lainnya, warisan, sumber daya alam, teknologi baru yang layak, dan pelayanan finansial, termasuk keuangan mikro. TARGET 1.5 Membangun daya tahan orang miskin dan berada dalam situasi rentan dan mengurangi situasi rentan dan mengurangi situasi tanpa perlindungan dan kerentanan terhadap kejadian-kejadian ekstrim yang berhubungan dengan perubahan iklim, juga kejutan dan bencana ekonomi, sosial, dan lingkungan lainnya.
	TUJUAN 2 MENGAKHIRI KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN NUTRISI YANG LEBIH BAIK DAN MENDUKUNG PERTANIAN BERKELANJUTAN TARGET 2.1 Mengakhiri kelaparan dan memastikan adanya akses bagi seluruh rakyat, khususnya mereka yang miskin dan berada dalam situasi rentan, termasuk bayi, terhadap pangan yang aman, bernutrisi, dan berkecukupan sepanjang tahun. TARGET 2.2 Mengakhiri segala macam malnutrisi, gizi buruk, penelantaran anak balita, dan mengatasi kebutuhan nutrisi untuk para remaja putrid, ibu hamil dan menyusui dan manula.





TARGET 2.3 Menggandakan produktivitas agrikultur dan pendapatan produsen makanan berskala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, pertanian keluarga, peternak dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan setara terhadap tanah, sumber-sumber produksi lainnya dan juga input, pengetahuan, layanan finansial, pasar dan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah dan lapangan kerja bukan pertanian.

TUJUAN 3 MEMASTIKAN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENDUKUNG KESEJAHTERAAN BAGI SEMUA UNTUK SEMUA USIA.

TARGET 3.4 Mengurangi sepertiga dari kematian dini yang disebabkan oleh penyakit tidak menular, melalui tindakan pencegahan dan pengobatan serta menaikkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

TARGET 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan dari penyalahgunaan zat berbahaya, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan bahan berbahaya dari alkohol.

TARGET 3.8 Mencapai cakupan layanan kesehatan universal, termasuk perlindungan resiko finansial, akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin yang aman, efektif, berkualitas dan terjangkau bagi semua.

TUJUAN 4 MEMASTIKAN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN BERKUALITAS SETARA, JUGA MENDUKUNG KESEMPATAN BELAJAR SEUMUR HIDUP BAGI SEMUA.

TARGET 4.1 Memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara dan berkualitas, yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan efektif.

TARGET 4.2 Memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki mendapat akses terhadap pengembangan masa kanak-kanak secara dini yang berkualitas, juga pengasuhan dan pendidikan pra-dasar agar mereka siap untuk masuk ke pendidikan dasar.

TARGET 4.3 Memastikan akses yang setara bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan tinggi, teknis dan kejuruan yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas.

TARGET 4.4 Meningkatkan jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keahlian yang relevan, termasuk keahlian teknis dan kejuruan, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan wirausaha.

TARGET 4.5 Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang setara terhadap semua tingkatan pendidikan dan training kejuruan bagi semua yang rentan, termasuk yang memiliki disabilitas, masyarakat adat dan anak-anak yang berada dalam situasi rentan.

TARGET 4.6 Memastikan bahwa semua remaja dan orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan mencapai kemampuan baca tulis dan kemampuan berhitung.

TARGET 4.7 Memastikan bahwa mereka yang belajar mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mendukung pembanguna berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembanguna berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, HAM, kesetaraan gender, mendukung budaya perdamaian dan anti kekerasan, kependudukan global dan apresiasi terhadap keberagaman budaya dan kontribusi budaya kepada pembangunan berkelanjutan.

TARGET 4.A Membangun dan meningkatkan mutu fasilitas pendidikan yang sensitif terhadap gender, anak dan disabilitas, dan menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.

TUJUAN 11 MEMBANGUN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TAHAN LAMA, DAN BERKELANJUTAN

TARGET 11.1 Memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan mutu pemukiman kumuh.

TARGET 11.2 Menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi semua, meningkatkan keamanan jalan, dengan memperbanyak transportasi publik, dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan dari mereka yang berada di situasi rentan, perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas dan manula.

TARGET 11.5 Mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terkena dampak dan secara substantif mengurangi kerugian ekonomi langsung yang berhubungan dengan produk domestik bruto yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana terkait air, dengan fokus kepada melindungi yang miskin dan berada di situasi rentan.

TARGET 11.7 Menyediakan akses universal terhadap ruang-ruang public yang aman, inklusif, dan mudah diakses, dan hijau, terutama bagi perempuan dan anak-anak, manula dan orang dengan disabilitas.

TUJUAN 16 MENDUKUNG MASYARAKAT YANG DAMAI DAN INKLUSIF UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIKAKAN AKSES TERHADAP KEADILAN BAGI SEMUA DAN MEMBANGUN INSTITUSI-INSTITUSI YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA LEVEL.

TARGET 16.9 Menyediakan identitas legal bagi semua, termasuk akta kelahiran

TUJUAN 5 MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN SEMUA PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN

TARGET 5.4 Menyadari dan menghargai pelayanan dan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan, infrastruktur, dan social, serta mendorong adanya tanggungjawab bersama di dalam rumah tangga dan keluarga yang pantas secara nasional.

TARGET 5.5 Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik.

MEMBUKA AKSES PEREMPUAN KEPADA PEKERJAAN DAN PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DI TEMPAT KERJA



- TARGET 5.A** Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol terhadap tanah dan bentuk property lainnya, pelayanan financial, warisan dan sumber daya alam sesuai dengan hukum nasional.
- TUJUAN 8** **MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, TENAGA KERJA PENUH DAN PRODUKTIF, DAN PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI SEMUA.**
- TARGET 8.5** Mencapai ketenagakerjaan secara penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi seluruh perempuan dan laki-laki, termasuk dengan kaum muda dan orang dengan disabilitas, juga kesetaraan upah bagi pekerjaan yang mempunyai nilai yang sama.
- TARGET 8.10** Menguatkan kapasitas institusi keuangan domestic untuk mendorong dan meluaskan akses terhadap perbankan, asuransi, dan layanan pendanaan untuk semua Tujuan 10: Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara
- TARGET 10.2** Memberdayakan dan mendorong penyertaan sosial, ekonomi, dan politik bagi semua, tanpa usia, jenis kelamin, disabilitas, bangsa, suku, asal, kelompok etnis, agama atau ekonomi atau status lainnya.
- TARGET 10.3** Memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi ketimpangan pendapatan, termasuk dengan mengeliminasi diskriminasi terhadap hukum, kebijakan dan praktek-praktek dan mendorong adanya legislasi, kebijakan, dan aksi yang sepiantasnya untuk hal ini.
- TARGET 10.4** Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan social, dan secara progresif mencapai kesetaraan.

MENINGKATKAN KONDISI TENAGA KERJA PEREMPUAN YANG KE LUAR NEGERI



- TUJUAN 8** **MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, TENAGA KERJA PENUH DAN PRODUKTIF, DAN PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI SEMUA**
- TARGET 8.8** Melindungi hak-hak pekerja dan mendukung lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, khususnya bagi perempuan buruh migran, dan pekerja dalam situasi genting Tujuan 10: Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara
- TARGET 10.7** Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang tertata, aman, teratur dan bertanggung jawab, termasuk melalui implementasi kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.

TUJUAN 3 **MEMASTIKAN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENDUKUNG KESEJAHTERAAN BAGI SEMUA UNTUK SEMUA USIA.**

- TARGET 3.1** Mengurangi rasio angka kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran.
- TARGET 3.2** mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi baru lahir dan balita, menjadi kurang dari 12 per 1.000 kelahiran, dan kematian balita menjadi 25 per 1.000 kelahiran.
- TARGET 3.3** Mengakhiri epidemic AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit tropis lainnya dan memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan lewat air dan penyakit menular lainnya.
- TARGET 3.7** Memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk untuk perencanaan, informasi, dan pendidikan keluarga, dan mengintegrasikan kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

MENINGKATKAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN UNTUK MENGURANGI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



TUJUAN 5 **MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN SEMUA PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN**

- TARGET 5.6** Memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi Tujuan 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
- TARGET 5.1** Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan di mana saja
- TARGET 5.2** Mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, termasuk perdagangan (trafficking) dan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya.
- TARGET 5.3** Menghapuskan segala bentuk praktek-praktek yang membahayakan, seperti perkawinan anak, dini, dan paksa, dan sunat pada perempuan.
- TARGET 5.C** Mengadopsi dan menguatkan kebijakan yang jelas dan penegakan perundang-undangan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua level.

TUJUAN 16 **MENDUKUNG MASYARAKAT YANG DAMAI DAN INKLUSIF UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES TERHADAP KEADILAN BAGI SEMUA DAN MEMBANGUN INSTITUSI-INSTITUSI YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA LEVEL.**

- TARGET 16.1** Mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.
- TARGET 16.2** Mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan segala penyiksaan terhadap anak.
- TARGET 16.3** Mendukung perangkat hukum di tingkat nasional dan internasional dan akses keadilan yang sama untuk semua.
- TARGET 16.10** Memastikan akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan fundamental sesuai perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional.

CATATAN: DISUSUN BERDASARKAN DOKUMEN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (INFID, TIFA, FORD FOUNDATION, ICCO, AUSTRALIAN AID, MAMPU)

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Database dan Publication Media Officer BaKTI-MAMPU dan dapat dihubungi melalui email ghufuran@bakti.or.id

Memangkas Galau Nelayan Jerowaru

Oleh **SYAIFULLAH**

Warga yang mencari lobster punya dua pilihan: ke Tanah Suci atau ke Malaysia. Kalau berhasil, mereka ke Tanah Suci naik haji, kalau gagal mereka ke Malaysia jadi TKI,” kata Junaidi, salah seorang fasilitator desa di Teluk Jor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

“Tapi sekarang, kebanyakan malah ke Malaysia daripada ke Tanah Suci,” pungkasnya sambil tersenyum.

Anekdot itu terasa perih, menggambarkan kehidupan nelayan di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ada empat dusun dari sepuluh dusun dalam wilayah Jerowaru yang terletak di pesisir. Keempat dusun itu dihuni sebagian besar warga yang menggantungkan hidup dari hasil laut, utamanya ikan dan lobster.



Sejak tahun 2015 yang lalu, kehidupan para nelayan utamanya yang bergantung pada lobster mulai terusik. Musababnya adalah Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan yang intinya melarang petani mengekspor lobster yang ukurannya masih di bawah 100 gram. Selang setahun kemudian, aturan ini semakin ketat dengan larangan menangkap lobster yang ukurannya masih di bawah 300 gram atau 8 sentimeter.

Aturan ini mencekik petani lobster dan nelayan yang sudah terbiasa menangkap baby lobster untuk dibudidayakan sebelum diekspor. Mereka harus menunggu lebih lama agar bisa menangkap lobster yang ukurannya di atas 300 gram. Penantian yang berisiko tinggi karena di satu sisi, kredit bank yang sudah mereka ambil tetap harus dibayar pokok dan bunganya.

“Jumlah kredit macet oleh nelayan menanjak tajam setahun belakangan ini,” ujar H. Moh. Kardi Yasin, sekertaris desa Jerowaru. “Untungnya,

pemerintah kabupaten berhasil melobi bank agar melunak sambil menunggu ekonomi para nelayan membaik,” sambungnya.

Bensin Yang Bikin Pusing

Sambil menantikan solusi dari masalah penerapan aturan yang masih membingungkan nelayan dan petani lobster itu, kehidupan terus berjalan. Dan bukan kehidupan namanya kalau masalah tidak menyertainya.

Salah satu masalah yang terus dihadapi para nelayan di Desa Jerowaru adalah penyediaan bahan bakar untuk bagang mereka. Bagang adalah salah satu alat tangkap ikan yang biasa digunakan oleh nelayan. Bentuknya menyerupai bangunan semi permanen yang biasanya diapungkan di tengah lautan. Di bawahnya terpasang jala untuk menangkap beberapa jenis ikan, udang, kepiting atau lobster. Konon, bagang pertama kali diperkenalkan oleh nelayan Bugis di tahun 1950an.

Untuk menarik perhatian ikan, di setiap bagang akan dipasangkan lampu yang dinyalakan di malam hari. Ikan-ikan akan tertarik untuk berkumpul di bawah cahaya dan tanpa sadar mereka akan masuk ke dalam jala.



Foto: Dok. Yayasan BaKTI/Syairullah



Foto Ihsan Djuned

Di Desa Jerowaru, satu bagang biasanya menggunakan tujuh lampu masing-masing dengan kekuatan 40 watt yang mendapatkan daya dari genset berbahan bakar bensin. Untuk satu bagang rata-rata membutuhkan lima liter bensin untuk masa operasi satu malam atau sekira dua belas jam. Di Desa Jerowaru, jumlah bagangnya berada di atas angka 20 buah.

“Bayangkan, dalam satu malam lima liter per bagang dikali 20 bagang, berapa emisi yang dihasilkan?” Tanya Lalu Kertawan atau yang kerap disapa Awung. Beliau adalah koordinator kabupaten untuk program Blue Carbon Consortium (BCC) di Kabupaten Lombok Timur.

Perhitungan itu adalah perhitungan minimal, belum termasuk bahan bakar yang digunakan oleh nelayan tangkap yang butuh lampu untuk menangkap ikan di malam hari. Apakah cuma itu yang menggunakan genset? Ternyata tidak, karena ada juga nelayan yang beroperasi menggunakan keramba jaring apung (KJA) untuk menangkap *baby lobster* atau lobster yang masih kecil. Mereka juga menggunakan genset sebagai penerangan di malam hari. Orang di Desa Jerowaru menyebutnya “pocong”.

Kenyataan itu masih ditambah rumit dengan ketersediaan bensin sebagai bahan bakar utama yang belum tentu selalu ada. Di saat tertentu, harga bensin bahkan menyentuh harga Rp. 10.000/ liter.

Ini berarti satu nelayan minimal menghabiskan Rp.50.000,- semalam untuk penerangan di bagang. Itu belum termasuk jika dia juga melakukan aktivitas menangkap ikan di malam hari.

Dasar-dasar itulah yang menjadi pertimbangan ketika BCC memutuskan untuk memilih Desa Jerowaru sebagai desa percontohan. Blue Carbon Consortium (BCC) sebagai salah satu penerima Hibah Pengetahuan Hijau – MCA Indonesia berfokus pada Pengelolaan Pengetahuan Pembangunan Rendah Emisi di wilayah Pesisir yang membantu memastikan pembangunan berkelanjutan dan rendah emisi terintegrasi dalam Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Provinsi NTB, khususnya di wilayah Pulau Lombok (NTB) dimana salah satu fokusnya adalah pengelolaan pengetahuan terutama yang berhubungan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Area kerja BCC adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat selain Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di Nusa Tenggara Barat, salah satunya adalah Desa Jerowaru yang masuk dalam kawasan Teluk Jor.

Sebagai percontohan, rencananya di Desa Jerowaru akan dibangun demonstration plot (demplot) tenaga surya yang diharapkan bisa menggantikan genset berbahan bakar bensin.

“Kita memang belum bisa mengakomodir semuanya, jadi sebagai percontohan kita akan menyiapkan panel surya untuk 20 bagang dulu,” ujar Lalu Kertawan.

Rencananya nanti akan dibuat satu terminal charger bertenaga surya yang akan dipasang di salah satu bagang yang ada di Teluk Jor. Setiap nelayan pemilik bagang akan datang ke terminal charger itu untuk mengisi daya baterai mereka. Pengisian daya dilakukan dari pagi hingga petang, lalu baterai itu akan siap dipakai sepanjang malam menggantikan genset berbahan bakar bensin.

Penetapan lokasi terminal charger belum final karena rencana ini memang baru akan dimusyawarahkan dengan Lembaga Pemangku Awiq-Awiq Teluk Jor (LPATJ). LPATJ adalah sebuah lembaga yang diisi oleh tokoh masyarakat dari Desa Jerowaru dan Desa Pare Mas yang berada di kawasan Teluk Jor.

Terminal charger ini tidak bergantung sepenuhnya pada tenaga surya, tapi juga dibantu dengan tenaga angin. Ini untuk mengantisipasi ketika musim hujan datang, saat di mana intensitas cahaya matahari berkurang drastis. “Ini memang baru percontohan. Diharapkan nanti akan direplikasi di tempat lain,” pungkas Lalu Kertawan.

Bulan Desember 2016, pemasangan panel surya menurut jadwal akan mulai dilakukan dengan menggunakan tenaga ahli yang memang sudah punya kualifikasi di bidangnya. Hal ini tentu saja karena mengingat bahwa pemasangan panel surya bukan hal yang mudah.

Berharap Masuk Ke RPJMDes

Rencana pengalihan sumber energi dari genset berbahan bakar bensin ke baterai yang menggunakan tenaga surya adalah angin segar bagi warga nelayan Desa Jerowaru. Saat ini mereka masih berada dalam kebimbangan ketika penerapan Permen No.1/2015 itu masih mengundang pro dan kontra. Di saat bersamaan mereka tetap harus mencari ikan menggunakan genset untuk menyambung hidup, padahal biaya untuk menghidupkan genset tidak sedikit.

“Kita sangat berharap sekali dengan program dari BCC ini. Kalau ini efektif, Insya Allah orang tidak mau repot juga. Coba, selama ini kalau turun ke laut harus bawa mesin, bawa minyak. Makanya, kalau ini berjalan efektif akan sangat membantu warga,” kata H. Moh. Kardi Yasin,

sekretaris desa Jerowaru.

Pembangunan demonstration plot (demplot) ini memang membutuhkan biaya yang besar karena panel surya yang digunakan juga banyak. Rencananya untuk mengakomodir kebutuhan 20 bagang. Diperkirakan biayanya bisa mencapai ratusan juta.

Lalu, bagaimana kalau misalnya rencana ini berhasil dan ingin direplikasi warga lain? Dari mana mereka bisa memperoleh dana sebesar itu? Pertanyaan ini dijawab oleh Lalu Kertawan, “Untuk sekarang ini memang butuh dana besar karena kita menggunakan panel surya kapasitas besar, tapi kalau mau direplikasi warga bisa menggunakan panel surya ukuran rumah tangga atau yang lebih kecil. Biayanya tentu lebih sedikit.”

Bukan itu saja, menurut Lalu Kertawan, tujuan utama dari apa yang dilakukan oleh BCC adalah pertukaran pengetahuan dengan harapan apa yang mereka lakukan bisa dimasukkan ke dalam perencanaan pemerintah daerah, khususnya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPKMDes).

“Kalau memang mau direplikasi, harapan kita pemerintah kabupaten atau provinsi bisa bekerjasama dengan desa untuk pembiayaannya,” ujar Lalu Kertawan.

Pihak Desa Jerowaru sendiri sudah berkomitmen untuk memasukkan program peralihan dari genset ke baterai bertenaga surya ini ke dalam RPJMDes mereka. Semua hanya menunggu waktu. Komitmen itu tentu didasari pada keyakinan mereka akan besarnya fungsi dan manfaat baterai bertenaga surya bagi warga nelayan di Desa Jerowaru.

Jalan panjang menuju penghematan energi dan pengurangan emisi lewat penggunaan panel surya memang masih panjang, tapi setidaknya harapan itu semakin cerah. Nelayan Desa Jerowaru yang masih galau karena Peraturan Menteri No.1/2015 tentu setidaknya akan merasa terbantu jika mereka bisa menghemat banyak jika tidak lagi membeli bensin untuk genset mereka. Nilai yang tidak sedikit yang diharapkan bisa mengurangi kegalauan mereka.

Nelayan senang, bumi pun riang karena emisi dari genset yang jauh berkurang.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih jauh tentang Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Pengetahuan Hijau di Indonesia, silakan menghubungi email: info@bakti.or.id



Restorasi dan Reintegrasi Berbasis Masyarakat Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Oleh **Arafah**

Apa yang ada dibenak Anda tentang kehidupan dalam penjara atau tahanan? Mungkin anda akan berpikir penjara itu ibarat dunia yang menakutkan, ruangan yang pengap, lembab, suram penuh ancaman.

Kehidupan Penjara Bagi Anak

Penjara diisi oleh manusia yang sangat beragam dengan berbagai latar belakang yang menjeratnya. Mulai pembunuhan, pemerkosaan,

begal, pencurian, perkelahian, penipuan, korupsi dan lain sebagainya. Hak kemerdekaan dirampas. Perlakuan negatif dan tindak kekerasan lainnya mungkin juga dilakukan oleh oknum Pegawai/penjaga Lapas. Situasi ini akan berlaku bagi tahanan dewasa maupun anak.

Pada suatu hari saya bersama rombongan pelatihan penyusunan buku panduan Restorasi dan reintegrasi anak yang berhadapan dengan hukum berbasis masyarakat yang diadakan oleh BaKTI-Unicef, mengunjungi anak-anak yang dititipkan di Penjara dewasa. Anak-anak ditempatkan dalam satu blok khusus. Ketika masuk dalam blok tersebut, jelas tergambar dari aura mereka. Suram, datar dan gelisah. Mondar mandir, keluar masuk dalam keadaan basah kebetulan ada beberapa anak yang lagi mandi di depan kamar mereka. Pada saat kunjungan kami bertepatan dengan musim hujan, kamar mereka begitu pengap, basah dengan air dari badan mereka yang habis mandi. Mungkin beberapa diantar mereka tidak memiliki handuk atau sarung untuk mengeringkan badan. Sedih rasanya melihat mereka.

Selama dalam masa proses peradilan pidana, beberapa studi menunjukkan bahwa mereka

mendapat perlakuan yang buruk bahkan kadang-kadang lebih buruk dari perlakuan terhadap orang dewasa pada suatu situasi yang sama. Perlakuan buruk ini tidak hanya terjadi di Rumah Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) namun tindak kekerasan terhadap mereka sering dialami sejak berada di kantor polisi yang berupa tamparan, tendangan, bahkan kadang-kadang pelecehan seksual.

Namun, kekerasan sering menjadi bagian dari upaya untuk memperoleh pengakuan. Rutan atau Lapas juga memberikan pengaruh buruk terhadap anak-anak di samping hak mendapat pendidikan baginya terabaikan (Lily, 2014). Studi pada tahun 2006, bahwa 96% kasus anak yang diajukan ke pengadilan mengakibatkan tindakan paksa berupa penahanan, 60% pidana yang dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan hanya sedikit atau bahkan tidak ada bantuan hukum (Ringkasan Kajian, Oktober, 2012 <http://www.unicef.org>, 2014). Berdasarkan Penelitian di Kota Makassar, Makmur, Hakim Anak Pengadilan Negeri Makassar, perkara anak sebenarnya sangat kental nuansa keadilan restoratif. Justru keadilan restoratif tersebut lahir dari Pembimbing Kemasyarakatan, tetapi ternyata hampir tidak pernah ada petugas BAPAS yang merekomendasikan agar anak tersebut tidak dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, Husni Guna, Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar menyatakan bahwa BAPAS tidak pernah merekomendasikan sanksi pidana pada anak, dan pembinaan anak dalam LAPAS merupakan upaya terakhir jika upaya lainnya gagal dilakukan (Adiguna dkk, 2014).

Jika anak di masukkan ke LAPAS anak-anak di LAPAS ternyata mayoritas hanya dibina secara umum (tidak memperhatikan kebutuhan dan kompetensi anak) dan proses belum tampak adanya model pembinaan yang bersifat individual (individual treatment model), maka dampaknya akan makin buruk bagi anak. Selama ini anak (apapun tindak pidana yang dilakukan) yang ada di LAPAS Anak maupun di suatu blok (di LAPAS Dewasa) sehingga pada siang hari dapat berinteraksi dan saling bergaul sehingga memungkinkan saling “belajar kejahatan.” Akibatnya, dalam LAPAS terjadi prisonisasi, meskipun anak tidak selalu menjadi residivis (penjahat kambuhan). Jika anak dimasukkan ke

LPKA atau LPKS yang tidak tertata model pembinaannya, dampak positif bagi anak dan masyarakat memang banyak, namun dampak negatif bagi anak cukup dominan (Widodo, 2012 : 25).

Sistem Peradilan Anak

Secara umum, pemberlakuan sistem peradilan pidana untuk penyelesaian perkara pidana dapat berdampak buruk bagi anak, terutama pemberian “stigma jahat” pada anak (stigmatisasi atau labelisasi), dan terjadinya pembiasaan kebiasaan-kebiasan buruk di LAPAS yang kemudian dipraktikkan lagi oleh anak ke luar LAPAS Anak (prisonisasi), bahkan pengulangan tindak pidana yang lebih serius akibatnya. Salah satu penyebabnya adalah adanya kontak langsung dengan penegak hukum yang dapat membuat anak frustrasi.

Jika perkaranya sudah diputus oleh pengadilanpun, mungkin akan menjadi stigma bagi anak pelaku tindak pidana. Karena itu, para ahli di bidang psikologi, hukum, etimologi kriminal, kriminologi, pendidikan, dan penologi selalu mencari jalan terbaik bagi anak, korban, dan kepentingan masyarakat.

Berkaitan dengan konsep keadilan restoratif dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak, menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (LN Tahun 2012 Nomor 153, TLN Nomor 5332), pengertian keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Berdasarkan Pasal 9, ditentukan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan: a).kategori tindak pidana; b) umur Anak; c) hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan d) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan Diversi tersebut harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: a) tindak pidana yang berupa pelanggaran; b) tindak pidana ringan; c) tindak pidana tanpa korban; atau d) nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah



Foto: Dok. Yayasan BaKTI/ Arifah

Kegiatan Penyusunan Buku Panduan Restorasi dan Reintegrasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berbasis Masyarakat di Kantor Yayasan BaKTI Makassar Foto Arifah

minimum provinsi setempat. Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: a) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b) penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; c) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d) pelayanan masyarakat.

Diversi yang dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk: a) pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b) rehabilitasi medis dan psikososial; c) penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; d) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau e) pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Penyusunan Buku Panduan dan Buku Saku

Di Sulawesi Selatan kasus diversifikasi telah meningkat dari 53 anak di tahun 2014 menjadi 314 anak di tahun 2015. Sementara periode Januari-Februari tahun 2016 telah ada 73 kasus diversifikasi, dengan rata-rata 26 anak per bulan. Di Makassar sendiri, tercatat 41% dari kasus diversifikasi di Sulawesi Selatan dilayani melalui LAPAS Makassar.

Sebuah upaya telah dilakukan pada tahun 2015 oleh AIPJ untuk memperkuat peningkatan kapasitas mitra pemerintah, penegak hukum, tokoh masyarakat, LSM dan pendidik tentang Hukum Pengadilan Anak Nomor 11 Tahun 2012. UNICEF dan ICJ mengamati bahwa sementara ada peningkatan jumlah anak yang didiversifikasi, namun ada juga anak-anak tidak menerima layanan dan tidak ada tindak lanjut selama dan setelah pengalihan.

Situasi yang sama terjadi pada anak-anak yang telah dibebaskan dari penjara. Berdasarkan masalah ini, buku saku yang praktis telah disiapkan berkaitan dengan reintegrasi berbasis masyarakat bagi anak-anak yang telah didiversifikasi.

Selain Buku saku, Unicef-BaKTI bersama Pemerintah Kota Makassar dan Kabupaten Gowa tengah menyusun Buku Panduan Restorasi dan Reintegrasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berbasis Masyarakat. Kegiatan ini berlangsung tanggal 24-26 Oktober 2016 di Kantor Yayasan BaKTI Makassar, diikuti oleh 12 orang peserta. 7 orang perempuan dan 5 orang laki-laki. Peserta berasal dari Bapas, Lapas Makassar, PSMP Salodong, Dinas Sosial Kota Makassar, Dinsos Gowa, Sakti Peksos dan ICJ.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Program ini. Hubungi kami melalui email info@bakti.or.id



Perubahan Besar dari Upaya yang Sederhana

Oleh

Irawan Dermayasamin Ibrahim

Nusa Tenggara Barat adalah sebuah provinsi yang berada dalam gugusan Sunda Kecil dan termasuk dalam Kepulauan Nusa Tenggara, terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dengan luas 20.153,15 km² serta memiliki 10 Kabupaten/Kota. Dari Kota Makassar, hanya dibutuhkan ±1 jam dengan pesawat untuk tiba di Lombok International Airport dan dari bandara dibutuhkan waktu ±30 menit untuk tiba Kota Mataram sebagai Ibukota Nusa Tenggara Barat. Dalam perjalanan dari bandara menuju Kota Mataram, kami beserta 14 peserta lain dari instansi/lembaga yang berbeda, disuguhkan dengan pemandangan sawah serta puluhan

masjid yang indah yang seolah-olah menegaskan eksistensi Lombok sebagai pulau seribu masjid, eksistensi bahwa ±90% masyarakat Nusa Tenggara Barat adalah muslim.

Provinsi Nusa Tenggara Barat memang dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat religiusitas penduduk yang cukup tinggi, dan ini berdampak pada pembangunan di seluruh sektor termasuk sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Perhatian akan pentingnya air bersih, lingkungan sehat dan sanitasi yang layak tidak hanya dilakukan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dalam menunjang kebutuhan ibadah masyarakat seperti dikutip dari pertemuan antar Kelompok Kerja (Pokja) di Kantor Bappeda Provinsi NTB, dimana dalam penyampaiannya Pokja AMPL NTB mengatakan bahwa, “Gubernur kami pernah mengatakan jika beliau ingin seluruh masyarakat NTB tidak terkendala air bersih untuk wudhu, dan memiliki lingkungan yang bersih untuk beribadah”.

Wujud perhatian terhadap air bersih dan sanitasi ditindaklanjuti dengan menjadikan air bersih dan sanitasi sebagai program prioritas RPJMD serta terbitnya regulasi berupa Peraturan Daerah Nomor 7 tentang 2015 tentang Pemerataan Akses Air Bersih, dan Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2013 tentang BASNO



Foto: Dok. Yayasan BaKTI/ N. Anar

(Buang Air Besar Sembarangan Nol). Regulasi tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi seluruh stakeholder terkait (mulai dari lingkup Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Desa) untuk merencanakan, mengkoordinasikan, serta melaksanakan program-program terkait air minum dan sanitasi.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari keaktifan, sinergitas, dan kreativitas yang tinggi dari Pokja AMPL/Sanitasi di Tingkat Provinsi, Pokja AMPL di Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Lembaga Donor. Di tingkat provinsi, Pokja AMPL/Sanitasi melakukan komunikasi yang intens untuk menumbuhkan kepedulian di lingkup eksekutif dan legislatif, serta menumbuhkan kepedulian Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dengan memberikan reward terhadap pencapaian “basno” di berbagai tingkat pemerintahan. Di tingkat kabupaten, Pokja AMPL sangat bersinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan yaitu; (1) pendampingan dalam perencanaan alokasi Dana Desa dengan menjadikan STBM sebagai salah satu prioritas desa, (2) pemberian pelatihan STBM bagi perangkat desa, (3) pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi, (4) fasilitasi dan membangun kerjasama yang baik dengan lembaga donor, serta (5) kampanye STBM kepada masyarakat dengan berbagai cara. Wujud kegiatan tersebut berupa pendataan yang akurat, penyuluhan, pemberian bantuan jamban,

pembangunan jaringan perpipaan, drainase, dan persampahan, pelatihan kader desa, gerakan Songkolaborasi (pemberian bendera bagi rumah tangga STBM), pembuatan dan sosialisasi lagu 5 pilar dan lagu PHBS, gerakan sambang santri, serta gerakan sedekah kalimat sehat STBM 5 pilar. Kegiatan tersebut seiring dan bersinergi dengan kegiatan Pemerintah Desa (contohnya Desa Timbanuh) yang tidak henti-hentinya berkomunikasi melakukan sosialisasi dan pendataan warga dari rumah ke rumah, melibatkan RT/RW untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat untuk tidak BABS dan tidak meminum air yang belum dimasak, menginisiasi pembangunan swadaya masyarakat, penerapan Peraturan Desa tentang tanggal 5 berlian (gotong royong setiap tanggal 5 untuk bersihkan lingkungan anda), serta melakukan pelatihan terhadap kader desa.

Kegiatan-kegiatan tersebut membawa pencapaian sanitasi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 80%. Keberhasilan tersebut diperoleh dari penerapan upaya-upaya sederhana, tetapi dilakukan dengan kolaborasi yang terintegrasi dari seluruh stakeholder, didukung dengan kelembagaan pemerintah yang terhubung secara emosional, dan diisi dengan semangat dan tingkat kepedulian yang tinggi dari semua pihak.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Program ini. Hubungi kami melalui email info@bakti.or.id

Pekerjaan Rumah dari Diskusi dan Pemutaran Film Dokumenter

Oleh **SYAIFULLAH**

Hotel Mina Tanjung, Lombok Utara, 21 November 2016. Hari itu, sekitar duapuluh orang hadir di ruang rapat lantai dua hotel yang terletak di tepi pantai itu. Mereka bukan untuk bersenang-senang, tapi menghadiri diskusi dan pemutaran film dokumenter tentang pengelolaan energi baru terbarukan berbasis masyarakat.

Acara itu digelar oleh Yayasan BaKTI yang selama ini berfokus pada berbagi pengetahuan, termasuk praktik-praktik pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Film dokumenter berdurasi 30 menit merekam upaya-upaya pemanfaatan dan pengelolaan energi baru terbarukan berbasis masyarakat dari tiga daerah.

Ada pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di Koak Sabang, Lombok Utara - NTB, pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) Kamanggih, Sumba Timur - NTB dan pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) di Rantau Sakti, Rokan Hulu, Riau.

Ketiga pembangkit listrik itu adalah dari masyarakat karena daerah mereka masih sangat kesulitan untuk mendapatkan listrik. Ketiga pembangkit listrik di tiga desa itu memang tidak sepenuhnya berasal dari desa mereka, karena uluran tangan pemerintah juga sangat besar. PLTBG Rantau Sakti misalnya, biaya pembangunan yang mencapai angka miliaran rupiah sebagian besar ditanggung oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, dalam pengelolaannya semua

pembangkit listrik tersebut diserahkan sepenuhnya kepada warga.

Setelah pemutaran film dokumenter yang menceritakan kisah pengelola pembangkit listrik energi baru dan terbarukan di tiga daerah itu, sesi diskusi dibuka.

Diskusi hari itu dipandu oleh Luna Vidya dari Yayasan BaKTI. Di awal acara, Luna Vidya sudah menegaskan bahwa diskusi hari itu tidak bermaksud untuk mencari pembangkit listrik mana yang lebih bagus, atau pertanyaan kenapa bukan pembangkit listrik di desa saya yang dibuatkan film dokumenter?

Luna Vidya menegaskan, acara hari itu dimaksudkan sebagai ajang berbagi informasi antara pelaku energi baru terbarukan dan pihak pemerintah. Selain itu, diharapkan diskusi bisa menghasilkan gambaran model mana yang dianggap sebagai model terbaik untuk mengelola potensi energi.

Diskusi berjalan hangat, dimulai dengan semacam curahan hati atau curhat dari beberapa pengelola PLTMH yang juga hadir sebagai undangan. Salah satunya adalah ibu Agus, wanita bernama asli Ibu Kersanep ini adalah istri pak Sutradi, operator PLTMH Koak Sabang. Melihat suaminya kesulitan menjaga dan merawat PLTMH Koak Sabang sendirian, ibu Agus turun tangan. Perlahan dia ikut menjadi asisten operator yang juga ikut berpeluh merawat PLTMH Koak Sabang.

Suami-istri pak Sutradi dan ibu Kersanep yang akrab disapa bapak dan ibu Agus (merujuk kepada

nama anak pertama mereka), adalah tulang punggung yang membuat PLTMH Koak Sabang masih terus bergerak hingga saat ini.

Beberapa cerita dan keluhan dari warga desa itu memunculkan pertanyaan; di mana peran pemerintah dalam pengadaan listrik untuk warga? Apalagi ketika satu persatu muncul kisah kalau masih banyak daerah yang belum dialiri listrik oleh PLN.

Syahrudin dari Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi Lombok Utaramencoba menjawab. Menurutnya, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara sudah melakukan banyak hal untuk mencoba memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Lombok Utara akan listrik termasuk mendorong PLN sebagai penanggungjawab utama pengadaan listrik di Indonesia untuk aktif berperan menyediakan listrik.

“Tapi kita tahu bersama, PLN adalah BUMN yang tetap memperhitungkan soal profit dan non profit termasuk nilai investasi,” kata Syahrudin. Jawaban ini menyiratkan masalah utama yang menjadi kendala bagi PLN yaitu soal nilai investasi yang kadang dianggap tidak menguntungkan.

Sebagai penyeimbang, pihak Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi Lombok Utaraberusaha sebisa mungkin mendorong penyediaan energi listrik lewat potensi energi baru dan terbarukan. Bentuknya bisa berupa PLTMH atau PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya).

“Kami bisa membangun, tapi masalahnya adalah di bagian pemeliharaan atau *maintenance*. Kami tidak bisa terus menerus memelihara pembangkit yang sudah dibangun,” pungkas Syahrudin.

Untuk pengelolaan ini, Syahrudin sebagai wakil pemerintah sangat berharap pada dukungan berbagai pihak. Baik itu warga sendiri, pihak LSM ataupun pihak akademisi. Masalah menjadi lebih rumit karena tahun 2016 ini, dinas pertambangan dan energi di tingkat kabupaten akan segera diakhiri. Kewenangannya akan



ditarik ke tingkat provinsi. Tentu ini meninggalkan pertanyaan tentang bagaimana model kerjasama lintas sektor nantinya?

Dalam diskusi hari itu juga terangkat topik tentang peningkatan kapasitas warga pengelola pembangkit listrik skala kecil tersebut. Sebagai pengelola, warga dipandang butuh peningkatan kapasitas agar bisa mengelola pembangkit listrik dengan lebih profesional. Sebagian peserta diskusi sepakat kalau di sisi ini, dinas koperasi bisa mengambil peran. Dengan pendampingan dari dinas koperasi, warga pengelola pembangkit listrik bisa bertindak secara profesional mengelola dan mengawasi pembangkit listrik mereka.

Diskusi hari pertama di Kabupaten Lombok Utara diakhiri lewat beberapa menit dari pukul 12 siang. Kesimpulan terpenting dari diskusi hari itu adalah adanya respon positif dari beragam elemen masyarakat melihat kesulitan dalam pemenuhan energi, khususnya energi listrik di daerah mereka. Meski peran pemerintah masih saja dianggap kurang, namun sekelompok warga tidak menyerah. Mereka berbuat semampunya demi menghadirkan listrik di rumah mereka.

Diskusi di Lombok Tengah

Selang dua hari kemudian, tepatnya tanggal 23 November 2016, acara yang sama digelar di Aerotel Praya, Praya Kabupaten Lombok Tengah. Diskusi dihadiri 20an peserta yang datang dari berbagai elemen seperti dinas pertambangan dan energi Kabupaten Lombok Tengah, Bappeda Lombok Tengah, dinas koperasi, UKM dan perindustrian dan perdagangan Lombok Tengah dan lembaga swadaya masyarakat serta unsur



pemberdayaan perempuan.

Acara yang dimulai pukul 10:00 WITA digelar dengan format yang sama dengan acara yang digelar di Lombok Utara. Ahmed Syarifudin, PRM MCA-Indonesia untuk Nusa Tenggara Barat dalam sambutannya menceritakan berbagai kegiatan mitra penerima hibah MCA-Indonesia utamanya di kawasan Lombok Tengah.

Selepas pemutaran film dokumenter yang sama dengan yang diputar di Lombok Utara, acara dilanjutkan dengan diskusi. Sekali lagi Luna Vidya tampil memandu diskusi hari itu.

Nur Huda dari Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral membuka diskusi dengan memaparkan beberapa realisasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Lombok Tengah. Menurut Nur Huda, ada sekian banyak proyek pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang sudah berjalan, baik itu menggunakan energi air, matahari maupun biogas. Sayangnya, ada banyak dari pemanfaatan energi itu yang tidak berjalan maksimal dan sekarang kondisinya rusak atau tidak terpakai lagi.

Masalah utama adalah di pengelolaan. Ada beberapa kesalahan komunikasi dan manajemen yang membuat pembangkit listrik skala kecil untuk warga itu jadi tidak berjalan maksimal lagi. Dalam acara tersebut kembali dihadirkan pasangan pak Agus dan ibu Agus alias pak Sutradi dan ibu Kersanep yang jadi operator dan pengelola PLTMH Koak Sabang. Mereka berbagi cerita suka-duka menjaga PLTMH Koak Sabang tersebut. Dari keharusan siaga 24 jam sehari menjaga PLTMH, menerima keluhan bahkan amarah warga ketika ada masalah, atau ketika mereka harus bekerja setahun penuh tanpa digaji.

Peran ibu Kersanep alias ibu Agus ini menarik perhatian. Menjadi operator PLTMH tentu bukan pekerjaan yang umum bagi seorang perempuan. Apa yang dilakukan oleh ibu Agus dianggap sebagai peran penting seorang perempuan.

Diskusi menjadi semakin menarik ketika beberapa peserta mulai menyoroti tentang kesiapan

kelembagaan terhadap sebuah proyek, utamanya proyek pembangunan pembangkit listrik menggunakan energi baru dan terbarukan. Kritik muncul atas realitas bahwa ada banyak pekerjaan yang dianggap belum selesai sampai tahap penguatan kelembagaan tapi sudah berpindah ke lokasi yang lain. Ini tentu berpotensi mendatangkan masalah pada proyek yang ditinggalkan tersebut.

Kritikan ini terkait dengan pertanyaan tentang peran lembaga adat yang sudah ada sebelumnya. Apakah lembaga adat juga dilibatkan? Atau justru tidak diperhitungkan keterlibatannya? Ada banyak kasus ketika ada pembangunan baru, dibentuk pula lembaga baru yang sebenarnya masih berkaitan dengan lembaga yang sudah ada sebelumnya, termasuk lembaga adat tersebut.

Semua ini dianggap memberi pengaruh besar terhadap keberlangsungan sebuah proyek pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan energi baru dan terbarukan dalam skala komunitas.

Sama seperti acara di Lombok Utara, acara di Lombok Tengah hari itu juga penuh dengan pertukaran informasi dan ide antar para peserta.

Benang merah dari dua diskusi tersebut adalah pekerjaan rumah tentang bagaimana penguatan kapasitas masyarakat dalam mendukung pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Sebuah pekerjaan rumah yang besar dan tentunya membutuhkan dukungan dari semua pihak.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih jauh tentang Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Pengetahuan Hijau di Indonesia, silakan menghubungi email: info@bakti.or.id

Artikel

Pelibatan Swasta Antisipasi Kebakaran Lahan dan Hutan Disiapkan

JAKARTA, KOMPAS — Akhir pekan ini, kepala daerah dan perangkat keamanan dari sembilan provinsi yang rentan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla diberi pengarahan oleh Presiden Joko Widodo. Kewaspadaan dibangun sejak awal agar ancaman karhutla dapat diminimalkan.

Arahan, antara lain, akan diberikan kepada gubernur, kepala kepolisian daerah, panglima komando daerah militer, dan kepala kepolisian resor dari sembilan provinsi. Kesembilan provinsi itu yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, provinsi di Kalimantan kecuali Kalimantan Utara, serta Papua.

<http://batukarinfo.com/news/pelembatan-swasta-antisipasi-kebakaran-lahan-dan-hutan-disiapkan>

82 Persen Desa di Indonesia Masih Andalkan Sektor Pertanian

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, 82 persen dari total jumlah desa di Indonesia hingga saat ini masih mengandalkan sektor pertanian.

"82 persen dari desa-desa masih hidup di sektor pertanian. Di dalamnya ada sektor perikanan dan peternakan," katanya dalam seminar di Gedung Widyaloka, Universitas Brawijaya, Malang, Kamis (19/1/2017).

Sayang, sistem pertanian di desa masih banyak mengalami kendala. Salah satunya adalah soal irigasi. Akibatnya, banyak desa yang sistem pertaniannya tergantung pada cuaca dan hanya memiliki satu kali musim tanam per tahun.

<http://batukarinfo.com/news/82-persen-desa-di-indonesia-masih-andalkan-sektor-pertanian>

Referensi



PANDUAN RESES PARTISIPATIF: Mengefektifkan Komunikasi Anggota DPRD dengan Masyarakat

Panduan Reses partisipatif, mengefektifkan komunikasi anggota dprd dengan masyarakat ini hasil kerjasama Program MAMPU AusAid, Yayasan Arika Mahina Ambon, dan Yayasan BaKTI

<http://batukarinfo.com/referensi/panduan-reses-partisipatif-mengefektifkan-komunikasi-anggota-dprd-dengan-masyarakat>



Kiprah Agroforestri Kanoppi Edisi 2016

Panduan Reses partisipatif, mengefektifkan komunikasi anggota dprd dengan masyarakat ini hasil kerjasama Program MAMPU AusAid, Yayasan Arika Mahina Ambon, dan Yayasan BaKTI

<http://batukarinfo.com/referensi/kiprah-agroforestri-kanoppi-edisi-2016>

Working Paper Kebutuhan dan Tantangan dari Pelaksanaan Sistem Penyuluhan Kehutanan dan Agroforestri di Indonesia

Kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) adalah hasil hutan dan kebun agroforestri yang berpotensi sebagai sumber penghidupan petani. Apabila pengelolaan dilakukan secara berkelanjutan, produk tersebut dapat memberikan peningkatan pendapatan bagi petani.

Guna mencapai pengelolaan yang berkelanjutan, petani membutuhkan akses ke informasi yang benar dan tepat. Namun di wilayah terpencil, petani kecil (yang memiliki luas lahan yang sedikit) memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi tersebut.

<http://batukarinfo.com/referensi/working-paper-kebutuhan-dan-tantangan-dari-pelaksanaan-sistem-penyuluhan-kehutanan-dan>



Kegiatan di BaKTI

16 DESEMBER 2016

Program Nulis Blog Relawan

Guna pengelolaan pengetahuan dan mengugah pihak lain untuk lebih peka kepada persoalan anak dan ibu, maka dibutuhkan mendokumentasikan setiap cerita pengalaman dan pembelajaran dalam bentuk tulisan.

Agar relawan sebagai pelaku pendampingan kepada anak dan ibu memiliki keterampilan menulis, LemINA mengadakan kegiatan Pelatihan Program Nulis Blog Relawan di kantor BaKTI Makassar. Kegiatan ini diikuti oleh 14 orang yang bertujuan untuk melatih keterampilan menulis dengan teknik penulisan yang baik dan benar, Memicu relawan untuk konsisten dalam menulis di blog masing-masing serta Memotivasi relawan untuk menjadi kontributor di website dan newsletter LemINA.



dan Kadir Sijaya mewakili Jurnalis korban ITE.

Upi Asmaradana, mewakili KPJKB dalam rilisnya menyampaikan bahwa pada tahun 2016 terjadi 13 kali kekerasan yang menimpa jurnalis ditambah 4 Kasus Kebebasan Berekspres. Sementara jenis-jenis kekerasan pada Jurnalis teridentifikasi antara lain Pengusiran dan Pelarangan liputan sebanya 5 kasus; diancam secara verbal sebanyak 2 kasus; penghinaan terhadap profesi jurnalis sebanyak 3 kasus; dan terjadi 6 kali kasus penganiayaan fisik saat meliput.

Direktur LBH Pers Makassar, Fajriani Langgeng, SH, berpandangan bahwa Revisi UU ITE tahun 2016, di mana norma dan praktek perubahannya masih tetap berpotensi mengancam kebebasan berekspres. Di samping itu ada duplikasi tindak

28 DESEMBER 2016

Dialog Refleksi Akhir Tahun Menyikapi Revisi UU ITE 2016

Sebuah Dialog Akhir Tahun diselenggarakan oleh Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspressi (KPJKB) berlokasi di Kantor BaKTI Makassar dengan mengangkat tema "UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Revisi, Medsos, Hoax, dan Karya Jurnalistik" & Rilis Database Kasus-kasus Kekerasan Jurnalis dan Kebebasan Berekspressi Sulawesi Selatan tahun 2016.

Tampil sebagai Panelis adalah Dr.Fadli A Natsir, SH,MH selaku Akademisi dari UIN Alauddin Makassar, Canny Watae mewakili Pakar Media Sosial, Baba Ong dari Koordinator Advokasi AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Indonesia, Fajriani Langgeng, SH selaku Direktur LBH Pers Makassar,

pidana karena ketentuan-ketentuan yang sama dalam KUHP masih mampu untuk menjangkau perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan medium internet. Pasal pidana tersebut masih bersifat pasal karet, multi interpretasi dan gampang disalah gunakan (kasus kasus UU ITE). Fajriani menambahkan bahwa mengurangi ancaman hukuman tidak menjawab akar persoalan, karena dalam praktek Aparat Penegak Hukum kerap menggunakan tuduhan ganda, pasal berlapis, sehingga ancaman pidana yang ada dapat menahan seseorang yang dilaporkan atas pasal 27 ayat 3. Menghadapi UU ITE, Pakar Media Sosial, Canny Watae, mengingatkan agar masyarakat bisa lebih cerdas memanfaatkan media sosial. Menurutnya, saat ini media sosial yang dibarengi dengan kehadiran internet generasi ke-4 (four G) telah membuat komunikasi menjadi horizontal. Informasi dapat dengan mudah dikonsumsi dan dihadirkan oleh setiap individu yang terhubung internet.

Diskusi ini diikuti oleh 28 peserta berasal dari kalangan jurnalis, LSM, Akademisi dan masyarakat.



Cedaw Menegakkan Hak Asasi Perempuan

PENULIS Achie Sudiarti Luhulima

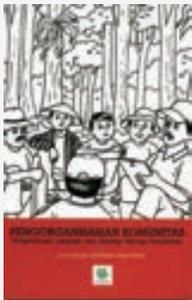
Buku ini ditulis dalam rangka mensosialisasikan Konvensi Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, kepada organisasi perempuan dengan tujuan memperkenalkan landasan hukum yang tersedia dalam menegakkan hak perempuan dan mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Karena isi dan tujuan Konvensi CEDAW belum banyak dikenal oleh para ahli hukum. Harapannya agar isi dan tujuan Konvensi CEDAW dapat menjadi bagian dari kegiatan kurikuler melalui kegiatan ajar mengajar dan di mana seorang dosen di fakultas hukum dapat melakukannya sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Juga agar para pejuang Hak Asasi Manusia, utamanya Hak Asasi Perempuan, para legislator, para penegak hukum, para penekun dan pengajar gender hukum, serta masyarakat pada umumnya dapat memahami makna Hak Asasi Perempuan yang terkandung dalam CEDAW.



Pembangunan Desa dari Modernisasi ke Liberalisasi

PENULIS Tarli Nugroho

Diundangkannya UU No.32 Tahun 2004 sebagai undang-undang terbaru yang mengatur pemerintahan daerah tidak membuat proyek peng-obyek-kan dan pencangkakan pada desa menjadi usai. Bahkan, undang-undang tersebut memfasilitasi terjadinya transformasi dari modernisasi ke liberalisasi. Selain masalah politik, sepertinya tidak banyak yang memperhatikan bahwa UU No.32 tahun 2004 memberi peluang bagi terjadinya liberalisasi investasi di pedesaan. Jika tidak diperhatikan dan dibendung, potensi ini bisa menyebabkan kegagalan-kegagalan pembangunan di tingkat negara di masa lalu akan direproduksi di tingkat desa. Dan jika itu sampai terjadi, struktur produksi akan merupakan ancaman serius bagi ketahanan pangan kita. Buku ini mengajak kita untuk memikirkan kembali bagaimana jalan terbaik memajukan desa, tanpa menerabas otonomi dan hak-hak kultural yang dimilikinya. Desalah yang telah melahirkan Indonesia, dan bukan sebaliknya. Sehingga, dari desa pula kita bisa melanjutkan Indonesia, yang kini sedang terpuruk.



Pengorganisasian Komunitas; Pengetahuan, dan Strategi Menuju Perubahan

PENULIS Tim Kemitraan SATUNAMA-USAID/SUM II

Pengorganisasian masyarakat (CO) adalah pengembangan yang mengutamakan pembangunan kesadaran kritis dan penggalian potensi pengetahuan lokal masyarakat. Pengorganisasian masyarakat mengutamakan pengembangan masyarakat berdasarkan dialog atau musyawarah yang demokratis. Usulan dan aspirasi komunitas merupakan sumber utama gagasan yang harus ditindaklanjuti secara kritis, sehingga partisipasi masyarakat dalam merencanakan, membuat keputusan, dan melaksanakan program merupakan tonggak yang sangat penting. Buku ini dirancang untuk menyajikan dasar gambaran, wawasan, pengetahuan, dan langkah-langkah umum untuk melakukan proses pengorganisasian komunitas.



Semusim, dan Semusim Lagi

PENULIS Andina Dwifatma

Novel ini memuat cerita yang sebenarnya sederhana, tidak banyak konflik, plot nya pun tidak rumit. Namun karena gaya menulis Andina Dwifatma yang nampak seperti gaya menulis Murakami, membuat pembaca menikmati kisah-kisah yang banyak dialami orang pada umumnya dalam novel ini. Tokoh utama dalam novel ini ada Aku. Dari sebuah keluarga disfungsi, Si Aku adalah anak yang dibesarkan oleh buku dan limpahan informasi tanpa filter agama, moral, nilai-norma. Kesepian, keterpurukan, dan ketiadaannya harapan yang selalu disangkalnya. Si Aku mencoba mempercayai hanya pada apa yang hanya ingin dipercayainya. Si Aku yang sejak awal ketidakwarasannya sudah tampak, tapi arah menuju pada kegilaannya disajikan dengan serius dan eksploratis, seperti kata Dewan Juri Sayembara Menulis DKJ. Novel ini memenangkan Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2012.